



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 247 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN UTAMA
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dharma penelitian, serta dalam upaya meningkatkan mutu akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu adanya Bantuan Penelitian Individual Dosen Utama Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima Bantuan Penelitian Individual Dosen Utama Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Bantuan Penelitian Individual Dosen Utama Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN SMH Banten;
9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN SMH Banten;
10. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN SMH Banten pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/71247 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN SMH Banten Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN UTAMA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Penelitian Individual Dosen Utama Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Tugas Penerima Bantuan:
a. melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman/juknis;
b. menyerahkan Laporan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan;
c. membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan dimaksud dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya kepada Rektor.
- KETIGA : Memberikan Bantuan Penelitian Individual Dosen Utama kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN SMH Banten Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 025.04.2.423548/2016 tanggal 07 Desember 2015 Revisi Pertama Tanggal 24 Maret 2016, dengan Kode Kegiatan 025.04.07.2132.008.305.004.A.521219 Sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)/Orang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 25 April 2016



DR. H. FAUZUL IMAN, M.A.
195893241987031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 247 TAHUN
 2016 TENTANG BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN
 UTAMA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
 HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	JUDUL
1.	Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M.	Ritual dan Simbolisasi Agama dalam Budaya Kuliner Masyarakat Banten
2.	Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.	Tafsir Kontekstual Wahbah Zuhaeli dalam Tafsir Al Munir
3.	Prof. Dr. H. Ilzamuddin, M.A.	Makna Jihad dalam Qur'an : Pespektif Semantik
4.	Prof. Dr. H. E. Syarifudin, M.Pd.	Tingkat Partisipasi <i>Single Parent</i> dan Motivasi terhadap Prestasi Belajar Siswa di MTs Negeri Kota Serang
5.	Prof. Dr. H. Udi Mufradi Mawardi, Lc., M.Ag.	Pola Hidup Pragmatis dan Materialistis (Telaah Teologis tentang Kehidupan Masyarakat Global)
6.	Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.	Meluruskan Konstitusi Indonesia: Kritik terhadap Pemberlakuan Demokrasi Langsung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
7.	Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd.	Model Pelayanan Keagamaan Kemenag dan MUI Provinsi Banten dalam Penanganan Masalah Keagamaan Lokal dan Aliran Sesat di Masyarakat Banten
8.	Dr. H. Helmy Faizi Bahrul Ulumy, M.Hum.	Muslim Pengelana Kajian tentang Musafir Tempat-tempat Keramat di Banten
9.	Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.Si.	Kontribusi Pemikir Ekonom Perempuan dalam Ekonomi Islam (Studi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam)
10.	Dr. Chairul Akmal, S.E., M.M.	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks Syariah Jakarta Islamic Index (JII)
11.	H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.	Sikap Linguis Arab terhadap Integrasi Terminologi Barat ke dalam Bahasa Arab
12.	Mohamad Rohman, M.Ag.	Kesadaran Kritis Gender Ulama Banten (Penelitian di Kalangan Alumni Peserta Pendidikan Ulama Laki-laki Program Rahima Jakarta)
13.	Dr. Hidayatullah, S.Ag., M.Pd.	Meningkatkan Kedisiplinan Belajar dan Kemampuan Menyusun Rencana Penelitian Mahasiswa Melalui Penggunaan Metode Berbasis Proyek (Penelitian Tindakan Kelas pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN SMH Banten Semester Enam Tahun 2016)
14.	Dr. H. Muhamad Hudaeri, M.Ag.	Membentuk Muslimah yang Modern (Kajian tentang Gerakan Perempuan Islam di Indonesia)
15.	Dra. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.	Simbolisasi Agama pada Ruang Publik di Propinsi Banten (Perspektif Komunikasi Politik)
16.	Dr. Kholid Suhaemi, M.SI.	Kepemimpinan dan Mutu Pendidikan Pesantren di Banten
17.	Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	Ketentuan <i>Li Al-Dzakari Mitslu Hazhzh Al-Untsayain</i> dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Petir-Serang)
18.	Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah Karena Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)
19.	Dr. Nana Suryapermana, M.Pd.	Persepsi Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Layanan Administrasi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
20.	Eneng Purwanti, M.A.	Komunikasi Transendental dalam Tradisi Ruwat Laut pada Masyarakat Banten (Studi Kasus di Pesisir Pantai Carita, dan Panimbang Kab. Pandeglang)

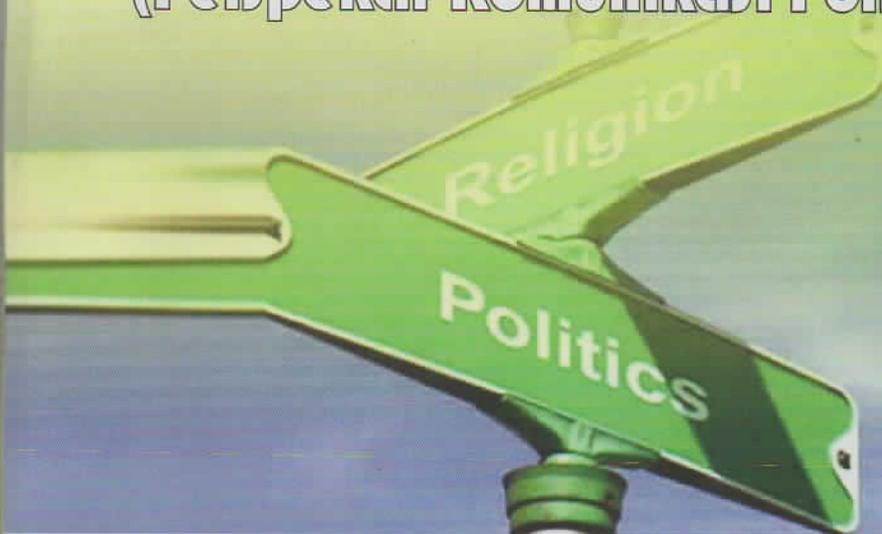
Rektor

 Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. A
 NIP. 195803241987031003

Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Simbolisasi Agama
pada Ruang Publik
di Propinsi Banten
(Perspektif Komunikasi Politik)



Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2016

LAPORAN HASIL PENELITIAN
SIMBOLISASI AGAMA PADA RUANG
PUBLIK DI PROPINSI BANTEN
(Perspektif Komunikasi Politik)



Oleh:

Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag.
NIP. 19700529 199603 2 001

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2016

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL**

Judul Penelitian : Simbolisasi Agama pada Ruang Publik di
Propinsi Banten (Perspektif Komunikasi Politik)
Kategori : Penelitian Individual Dosen Utama
Bidang Ilmu : Sosial Keagamaan (Dakwah dan Komunikasi)
Peneliti : Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag.
NIP : 19700529 199603 2 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/b)
Jabatan : Lektor Kepala
Jangka Waktu : 6 bulan
Biaya : Rp. 14.000.000,00

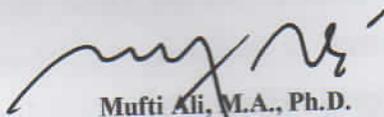
Serang, Oktober 2016

Peneliti



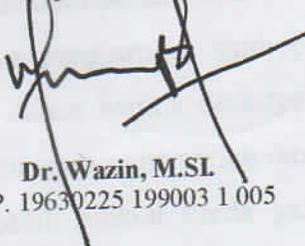
Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag.
NIP. 19700529 199603 2 001

Ketua LP2M



Mufti Ali, M.A., Ph.D.
NIP. 19720806 200012 1 001

Kepala Puslitpen



Dr. Wazin, M.SI.
NIP. 19630225 199003 1 005

Mengetahui

Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.
NIP. 19580324 198703 1 003

LAPORAN HASIL PENELITIAN
SIMBOLISASI AGAMA PADA RUANG
PUBLIK DI PROPINSI BANTEN
(Perspektif Komunikasi Politik)



Oleh:

Umdatul Hasanah, M.Ag.
NIP. 19700529 199603 2 001

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Sege nap puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan semesta Alam. Dengan segala karunia Rahhmat, dan Kasih sayang serta petunjuk Nya kita hamba-hamba-Nya dapat beraktifitas dan berkarya. Mudah-mudahan melalui karya sederhana ini menjadi bagian dari amal shalih dan bentuk pengabdian serta ibadah kita kepadaNya. Amin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada insan pilihan yang menjadi tauladan bagi manusia seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Dengan bimbingan risalahnya yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

Penelitian ini berjudul: Simbolisasi Agama pada Ruang Publik di Propinsi Banten (Perspektif Komunikasi Politik). Penelitian ini lahir dari kegelisahan intelektual penulis dan rasa ingin tahun penulis terhadap maraknya penggunaan simbol-simbol agama (Islam) di Banten, baik dalam bentuk deskripsi verbal atau istilah-istilah keagamaan, maupun penampilan dan aksesorias maupun juga kebijakan publik melauai Perda yan berbasis Syari'ah. Bahkan dalam selogan Provinsi Banten juga mencantumkan kata Iman dan Taqwa di sisi lain, namun apa makna dari simbol-simbol tersebut dalam perspektif

komunikasi, khususnya komunikasi politik. Apakah hal itu memiliki tendensi komunikasi politik atau hanya identitas.

Penelitian ini mendapat bantuan pendanaan dari DIPA IAIN SMH BANTEN melalui Lembaga Penelitian. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor IAIN SMH Banten yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua LP2M, dan juga Kepala Pusat Penelitian IAIN SMH Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan sumber-sumber informasi terkait dengan maksud penelitian ini. Ucaan terimakasih dan rasa sayang yang teramat sangat kepada keluarga, orang tua, suami dan anak – anak penulis yang dengan segenap pengertian, dukungan dan do'a mereka, mempermudah penulis dalam menyelesaikan tugas dan karya ini.

Cilegon, Oktober 2016

Umdatul Hasanah, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah...	10
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
F. Kerangka Konseptual.....	20
G. Metodologi Penelitian	24

BAB II AGAMA, SIMBOL DAN KOMUNIKASI POLITIK

A. Simbol Komunikasi dan Komunikasi Politik	29
1. Definisi Simbol	29
2. Komunikasi Politik.....	37
B. Agama dan Simbol Sebuah Makna Komunikasi.	42
C. Agama, Budaya dan Politik: Manifestasi Politik Simbol.....	49

BAB III KONDISI OBYEKTIF BANTEN DAN MASYARAKATNYA

A. Sekilas tentang Wilayah Provinsi Banten.....	63
B. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Banten.....	70
C. Kehidupan Agama dan Politik di Banten	83

BAB IV BENTUK DAN PEMAKNAAN SIMBOL AGAMA DI RUANG PUBLIK

A. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Istilah atau Deskripsi Verbal.....	93
--	----

B. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Penampilan atau Artifaktual.....	101
C. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Kebijakan	109
D. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Penamaan dan Tata Ruang.....	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran-saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya penggunaan simbol-simbol agama (Islam) saat ini demikian mewarnai ruang publik, baik fisik maupun virtual. Menurut penelitian Noorhaidi Hasan, dkk., Banten merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang sangat akrab dan lekat dengan dengan simbol-simbol demikian.¹ Simbol-simbol keagamaan dapat di lihat dalam berbagai macam bentuknya, baik dalam bahasa verbal maupun non verbal. Bahasa verbal dengan idiom-idiom agama tidak hanya akrab melalui lisan tokoh agama.

Hal demikian juga kerap mengalir dari para mulut politisi maupun kandidat pemimpin pada saat kampanye pileg, pilkada maupun pilgub. Baik dalam bentuk bahasa, dalil-dalil agama, penampilan dan pakaian yang identik dengan kesalihan agama, seperti penggunaan baju koko, gamis, sorban, peci haji, jilbab, dan lainnya. Demikian juga penggunaan institusi keagamaan, seperti masjid, musholla, madrasah, pesantren, majelis taklim dan lainnya. Di tambah dengan penguatan

¹ Lihat hasil penelitian Noorhaidi Hasan, dkk., *Islam Di ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2011).

kehadiran dan dukungan tokoh agama seperti kiyai, ulama, ustadh-ustadhah untuk memperkuat legitimasi politik. Hal itu kerap dilakukan oleh banyak kontestan politik yang akan bertarung merebutkan hati para pemilih. Dengan demikian penggunaan bahasa dan simbol-simbol agama masih dipandang sebagai salah satu kekuatan dan modal politik, baik para politisi maupun pemerintah yang berkuasa di Banten untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Pandangan demikian dibenarkan oleh beberapa hasil kajian, salah satunya M. Lutfullah Karaman yang menyatakan bahwa, Penggunaan simbol-simbol tradisional dan keagamaan memiliki dampak yang signifikan dalam sikap politik karena agama memiliki hubungan yang positif dengan politisasi massa.² Penggunaan simbol-simbol keagamaan sebagai instrument politik merupakan upaya mencari simpati dan dukungan atas nama agama. Walaupun hal itu dapat mereduksi nilai-nilai agama yang sakral kepada kepentingan politik yang profan dan temporal. Sehingga agama baik dalam bentuk institusi, simbol dan pesan-pesannya tidak murni lagi, ia menjadi kabur karena berada pada bayang-bayang kepentingan. Namun nampaknya

² M. Lutfullah Karaman, — Religion, Politics, And Mobilisation: A theoretical Perspective With A Special Note On The Indian Khilafat Movementl, *Alternatives Turkish Journal of International Relations*, Vol.3, No. 1 Spring 2004), <http://www.Jstor.org/alternativejournal.net/Vol.3/number1/karaman.pdf>.(diakses ;8 – 12-2012).

kecenderungan publik demikian kuat dalam hal penggunaan simbol-simbol demikian di Banten. Justru ketika jauh atau sepi dari simbol-simbol seperti itu, bukan hanya akan mengaburkan identitas, namun juga dapat berdampak pada dukungan dan legitimasi publik.³

Penggunaan kata-kata dan himbauan peningkatan iman, takwa, amal shalih, akhlak, khoiroummah kerap kali didengungkan baik oleh politisis maupun para pemimpin di wilayah ini. Demikian juga bentuk-bentuk bahasa simbolik yang Nampak secara fisik. Seperti lafald Asmaul Husna dapat ditemui dengan mudah di sepanjang jalan Protokol Kota Serang dan Kabupaten Serang. Demikian juga di Kota Tangerang yang dikenal banyak menggunakan simbol-simbol Islam. Menurut penelitian Khairunnisa, penegasan identitas keislaman demikian mencolok di tangan kehidupan masyarakatnya yang multicultural.⁴ Aroma keislaman demikian terasa begitu

³ Kondisi demikian pernah dialami oleh politisi H.A.J. Desmon Mahesa, salah satu kandidat caleg dari partai Gerindra dapil Banten pada Pemilu 2014. Masyarakat sempat meragukan ke-Islamannya karena namanya yang terkesan sebagai luar Islam. Untuk menunjukkan identitas keislamannya ia cantumkan Ahmad Junaedi yang selama ini tidak dikenal publik. Di sampng juga ia menunjukkan simbol fisiknya dengan menggunakan peci sebagai media untuk mendekatkan dirinya dan pengakuan publik. Di tambah juga penjelasannya di media televisi dalam beberapa acara dialog.

⁴ Khairunnisa, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi Simbol-Simbol Islam Pada Ruang Publik Di Kota Tangerang* (Ciputat: YPM, 2011).

memasuki wilayah ini yang disambut dengan simbol Kota —Akhlakul Karimah sebagai moto Kotanya. Demikian juga penggunaan idiom-idiom keagamaan lainnya serta peraturan daerah yang sangat lekat dengan simbol-simbol keagamaan sebagai bentuk penegasan identitas keislamannya.

Penggunaan simbol-simbol keagamaan pada ruang publik banyak dilakukan namapaknya bukan hanya sebagai penunjuk identitas maupun seruan keagamaan semata sebagai (bahasa dakwah), namun memiliki makna pada lingkup yang lebih luas. Ia bisa dimaknai sebagai ajakan dalam bentuk untuk mempengaruhi yang digunakan sebagai bahasa iklan yang ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan dalam produk.⁵

Simbol-simbol keagamaan juga dilakukan bukan sekedar untuk memengaruhi dalam pengertian syiar atau dakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh para ustadh maupun ustadhah. Baik dari aspek penampilan maupun perilaku. Seperti yang dilakukan oleh ustadh Jefri Al-Bukhori misalnya dengan gaya pakaiannya, mengenakan baju koko yang trendy kerap kali diikuti oleh banyak kalangan. Tidak hanya sesama publik figur

⁵ Abbas Naseri dan Ezhar Tamam, —Impact of Islamic Religius Symbol In Producing Favorable Attitude Toward Advertisementl, *The Public Administration and Social Policies Review*, IV Year, No. 1, Juni 2012 . http://www.uwg/revald/files/nr8/7-20_nasr.pdf. (diakses: 8 / 12 / 2012).

namun juga masyarakat biasa. Demikian juga gaya busana Islami kaum perempuan dengan jilbab trendy seperti yang dilakukan oleh Dewi Sandra, Inneke Koesharawati yang identik dengan kaum muslimah muda perkotaan. Maupun gaya hijab Oki Setiana Dewi yang belakangan wajahnya akrab dalam acara keagamaan di televisi dengan *style* busana muslimah yang Islami atau syar'ī.

Walaupun banyak kalangan yang menilai hal itu sebagai iklan dagang untuk mencari keuntungan ekonomi. Terepas dari tujuan itu penampilan publik figure yang —hijrah' baik dari aspek penampilan mauun sikap dan perilakunya, sedikit banyak telah memberikan pengaruh bagi publik. Khususnya di lingkungan Artis atau publik figur sendiri yang saat ini banyak yang merubah penampilannya. Dengan tidak mengurangi jobnya sebagai artis. Beberapa pihak justru merasa diuntungkan dan semakin lanca rizkinya (jobnya) setelah berubah penampilan lebih islami. Bahkan juga lebih terjaga dari aspek prgaulannya dari sebelumnya.

Memengaruhi orang lain dengan pesan dan simbol-simbol agama dari perspektif dakwah merupakan hal mulia dan dianjurkan dalam agama. Namun demikian dakwah bukan hanya meberikan contoh penampilan semata. Akan tetapi lebih utama pada sikap dan perilaku yang lebih agamis. Dalam perspektif

teori komunikasi bukan hanya panggung depan yang nampak baik, namun juga panggung belakang yang konsisten dengan kebaikan.⁶ Sebab bagi seorang juru dawah atau yang ernia berdakwah memengaruhi orang lain itu urutan berikutnya setelah individu mengamalkan apa yang ia ketahui.

⁶ Dalam teori Dramaturgis seseorang kerap bersikap sebagaimana halnya bermain drama. Yaitu ada layar depan dan layar belakang atau di balik layar. Kehidupan di balik layar inilah kehidupan seseorang yang sesungguhnya. Wajahnya asli tanpa mik-up, sikapnya aslisebagaimanakeperibadian dan karakternya. Sementara layar depan atau panggung depan adalah penampilan semu karena sedang bermain drama dan karakter. Lihat Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung Rosdakarya, 2006), 114.

Namun demikian penggunaan simbol-simbol kebaikan dan pesan keagamaan, saat ini bukan hanya digunakan sebagai kegiatan dakwah semata. Akan tetapi bermaksud memengaruhi orang lain dengan tujuan-tujuan utama tertentu, seperti ekonomi maupun politik. Yaitu dengan cara memengaruhi pesan, kesan dan kesadaran orang lain semata-mata untuk dianggap, dicitrakan dan kemudian dipandang agamis. Menarik simpati dan mendapat legitimasi serta justifikasi (pembenaran) publik semata-mata demi kepentingan politik, sementara kehidupan asli maupun janjinya tidak sesuai dengan dunia panggungnya. Sikap demikian jelas akan melahirkan perasaan antipasti dan merugikan publik.

Penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam panggung politik marak dilakukan baik dalam kampanye pemilu maupun pilpres. Hampir semua partai politik menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam kampanye politiknya baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun samar-samar.⁷

⁷ Hampir semua partai politik (partai) menggunakan simbol-simbol agama saat berkampanye dalam Pemilu 2004; 2) Penggunaan simbol-simbol agama dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung mempergunakan simbol-simbol agama secara terang-terangan (vulgar). Penggunaan simbol-simbol agama secara terselubung dan *sophisticated* dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar yang memperhatikan tuntutan situasi real yang ada; 3) Penggunaan simbol agama dalam kampanye tidak selamanya efektif untuk memenangkan Pemilu. Terpilihnya pasangan Susilo Bambang

Dengan demikian penggunaan simbol keagamaan masih dianggap sebagai magnet penarik dan pemikat dalam panggung politik, walaupun efek signifikan terhadap peningkatan pemilih dan kemenangan masih harus dibuktikan.

Salah satu contoh yang terjadi pada kasus pilkada DKI tahun 2012 misalnya, kemenangan Jokowi dan Ahok yang justru jauh dari simbol-simbol agama, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo-Nahrawi yang notabene-nya *incumbent* dan lekat dengan simbol-simbol adat, budaya dan keagamaan justru dikalahkan oleh pasangan yang diragukan keagamaannya. Artinya pandangan masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan sebagai alat politik dan retorika belaka sudah mulai mengalami pergeseran, khususnya pada masyarakat perkotaan (urban). Namun demikian belum tentu terjadi hal yang sama pada masyarakat dan wilayah lainnya terutama pada masyarakat pedesaan dan tradisional.

Kondisi demikian berbeda dengan Banten, sebagai daerah yang berbasis pedesaan dan pertanian dan karakter masyarakatnya yang dikenal religius, di mana ikatan-ikatan

Yudhoyono dan Jusuf Kalla cenderung akibat kampanye yang mengusung simbol perubahan dan figur pribadi;4) Penggunaan simbol agama pada Pemilu 2004 berakibat negatif yang melahirkan fragmentasi nilai keagamaan dan perendahan wibawa tokoh agama. Hasil Penelitian Badan Litbang Agama dan Diklat Departemen Agama, —Penggunaan Simbol-simbol Agama Untuk Kepentingan Politik di Indonesia, tahun 2004

kekerabatan dan emosi keagamaan masih cukup kental maka penggunaan simbol-simbol keagamaan sebagai instrument politik masih dianggap penting dan harus dilakukan. Sehingga tidak salah ketika pada kampanye Pilkada (pemilihan Gubernur Banten 2010), semua calon lekat dengan simbol-simbol keagamaan.⁸ Baik dari bahasa dan pesan kampanye, maupun penampilan fisik (seperti penggunaan, peci, sorban, tasbih, jubah, jilbab) menjadi asesoris yang dipajang melalui baliho, postur, spanduk dan kalender. Juga penggunaan otoritas keagamaan (kiyai, ustazd) sebagai jurkam termasuk melibatkan institusi keagamaan seperti majelis taklim sebagai peserta dan pendukung kampanye, termasuk menjadikan momen-momen hari besar keagamaan yang diisi dengan kampanye terselubung

⁸ Lihat, media, brosur dan iklan kampanye pemilihan Gubernur tahun 2012, demikian juga dengan pesan-pesan yang digunakan banyak menggunakan bahasa agama, di samping juga menggunakan otoritas keagamaan seperti kiyai dan ustazd sebagai juru kampanye. Bahkan institusi keagamaan yang seharusnya steril dari politik ternyata juga dijadikan ruang dan panggung politik salah satu calon, seperti masjid dan majelis taklim menjadi ruang kampanye, baik dengan cara terang-terangan di forum maupun sekedar menyebarkan kalender yang bergambar salah satu calon Gubernur.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Kelebihan manusia di banding dengan makhluk lainnya adalah manusia kemampuannya mengkonsepsi perasaan melalui simbol dan bahasa,⁹ sehingga manusia senantiasa lekat dengan simbol, sedangkan binatang hanya mampu menangkap tanda sederhana yang nampak, manusia bukan sekedar menangkap tanda tapi menggunakan dan memaknai simbol sehingga manusia disebut sebagai homo symbolicum. Keunikan manusia lainnya adalah karena manusia memiliki kemampuan memanipulasi simbol-simbol berdasarkan kesadaran.¹⁰

Dengan demikian simbol sesungguhnya erat hubungannya dengan kecerdasan manusia sebagai makhluk yang berfikir, di mana pikiran, sikap dan perilakunya termanifestasi dalam bentuk-bentuk simbolis. Di antaranya lahir bentuk-bentuk simbolis dalam hubungannya dengan yang supranatural (Tuhan atau yang suci) yang kemudian dilembagakan sebagai simbol-simbol agama, di mana simbol dijadikan sebagai media untuk mendekati yang sakral. Dalam Islam, simbol-simbol keagamaan bukan lahir secara alamiyah dan spontan, namun berdasarkan kesadaran dan juga tuntutan wahyu.

⁹Menurut Susan Langger, sebagaimana dikutip W. Little Jhon-Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, edisi-9, terj. Muhammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Humanika, 2009). 153-154

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2008). 77

Simbol-simbol keagamaan bisa didekati dengan beragam perspektif, seperti Antrhopologi sebagaimana dilakukan oleh Clifford Geertz. Pada kajiannya di wilayah Mujokuto, masyarakat memiliki simbol-simbol dan ritual keagamaan yang berbeda antara kelompok, Abangan, Santri dan Priyayi.

Simbol-simbol keagamaan juga dapat diidentifikasi dari persepektif politik, dalam politik Indonesia tidak ada pemisahan antara yang sakral dan yang profan urusan duniawi dan ukhrowi, hal itu setidaknya tercermin dari penggunaan simbol-simbol agama dalam panggung politik. Seperti lambang partai yang menggunakan simbol tempat sakral (ka'bah), mengumbar slogan dan pesan-pesan keagamaan dalam pentas politik dan melibatkan institusi dan otoritas keagamaan dalam kampanye politik. WF. Wertheim yang menganalisa pola kehidupan politik Indonesia dengan teori politik *patron client*, sebagaimana dikutip Kuntowijoyo,¹¹ di mana kemenangan politik sangat ditentukan oleh mobilitas mesin politik dari level atas birokrasi sampai level bawah, melibatkan institusi pemerintah (PNS) terutama bagi calon incumbent yang memiliki ikatan hirarki (atas dasar azas loyalitas) seringkali memanfaatkan birokrasi sebagai alat politik.

¹¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung ; Mizan, 1991). 145 -146

Simbol-Simbol Keagamaan juga bisa didekati dengan perspektif Politik identitas, sebagaimana kajian Noorhaidi Hasan dkk., juga kajian Khairunnisa. Dari kedua kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan simbol-simbol Islam di ruang publik sebagai bentuk penguatan identitas keislaman, di tengah masyarakat yang plural dan multicultural. Kondisi demikian hadir seiring dengan kehidupan demokratisasi di Indonesia. Sehingga masing-masing kelompok termasuk kelompok keagamaan —berjuang untuk merebut dan mewarnai ruang publik dengan wacana yang sesuai keinginannya. Mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dapat melakukan hal tersebut.

Sementara kajian ini di batasi pada permasalahan terkait dengan simbol agama sebagai bagian dari komunikasi politik. Politik dan agama memiliki cara dan tujuan yang berbeda, politik sebaik dan sesoleh apapun kemasannya, tujuan utamanya adalah kekuasaan. Sehingga kerap kali banyak cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan, termasuk menggunakan idiom, istilah, simbol, tempat, otoritas keagamaan untuk kepentingan politik. Sehingga bahasa agama yang demikian mulia dan simbol-simbol keagamaan yang dimaknai sakral, kemudian mengalami penyimpangan makna yang tidak jarang menyimpang dari makna sesungguhnya ketika berada di tangan politisi maupun kekuasaan.

Menguatnya simbol agama seperti pernyataan menguatnya simbol keagamaan idealnya menunjukkan bentuk pembangunan yang religious jauh dari kemaksiatan dan akhlak yang buruk. Bekeadilan, amanah, terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme, terwujudnya pemerintahan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Simbolisasi agama yang digunakan khususnya terkait dengan tokoh publik, tokoh politik dalam hubungannya dengan politik dalam perspektif komunikasi politik. Sebagaimana diketahui, bahwa komunikasi politik adalah salah satu bentuk komunikasi yang erat hubungannya dengan pelaku, institusi dan juga kepentingan politik.¹² Dalam hal ini khususnya dalam penggunaan simbol-simbol agama, baik verbal maupun non verbal yang digunakan sebagai media komunikasi politik untuk memengaruhi atau berpengaruh bagi orang lain.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini hanya akan dibatasi pada penggunaan simbol – simbol agama di ruang publik wilayah Banten, seperti penggunaan Asmaul Husna dan di sepanjang jalan protokol Kota Serang, moto

¹² Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung ; Remadja Karya, 1989).

Akhlakul Karimah dan penamaan tempat-tempat umum atau ruang publik dengan istilah-istilah agama.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana bentuk-bentuk simbolisasi agama digunakan di ruang publik?. Bagaimana pemaknaan terhadap pesan-pesan simbolik bernuansa agama di mata Komunikan?

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan batasan dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa terdapat penggunaan simbol-simbol keagamaan yang melekat dalam politik pembangunan di Banten baik dalam bentuk komunikasi verbal dan juga non verbal. Penelitian ini juga ingin membuktikan pandangan bahwa menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagai basis retorika politik merupakan cara yang menguntungkan bagi komunikator, dapat meningkatkan citra diri dan menutupi kelemahan dirinya sebagai komunikator.

Adapun kegunaan penelitian ini pertama, diharapkan menjadi sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang konstruktif, khususnya pada pengembangan ilmu dakwah kontemporer dan komunikasi politik. Kedua, dapat memberikan informasi dan gambaran yang memadai tentang

kehidupan agama, budaya dan politik serta kebijakan pembangunan di Banten. Ketiga, diharapkan menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pemerintahan di Propinsi Banten untuk meningkatkan pola komunikasi secara adil dan berimbang, dua arah, bersikap terbuka dan aspiratif sehingga kehendak komunikan (publik) dapat dipahami dan hak-hak publik dapat terpenuhi untuk menikmati pembangunan yang adil dan merata sehingga kehidupan masyarakat Banten yang sejahtera lahir dan batin dapat terwujud dengan sebenarnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis menentukan masalah dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan kajian literatur terkait dengan tema di atas yaitu terkait dengan masalah agama, dan komunikasi politik. Sesungguhnya telah banyak kajian akademik tentang tema di atas yang terkait dengan topik kajian penulis. Namun hanya beberapa saja yang penulis lakukan kajian secara mendalam yang terkait langsung dengan simbol-simbol, agama dan budaya dalam hubungannya dengan komunikasi politik dan kebijakan. Beberapa aliteratur di antaranya:

M. Lutfullah Karaman yang berjudul — Religion, Politics, And Mobilisation: A Theoretical Persepective With Special Note on the Indian Khilafat Movement¹¹ dalam *Turkish*

Journal of International Relations, Vol. 3, No. 1 Spring 2004. Dalam artikel ini, Karaman menghubungkan antara agama, ideology dan simbol-simbolnya sebagai sebuah dimensi penting dan berpengaruh dalam kehidupan manusia, di mana agama dan politik berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan (modernitas), agama melalui penguatan simbol-simbolnya penting sebagai konstruksi identitas dalam hubungannya dengan mobilitas politik massa. Dalam hal ini Karaman secara spesifik menghubungkan antara Islam, dan simbol-simbol keagamaan dan mobilisasi politik dalam kasus Indian khilafat Movement.

Kedua, artikel Robert W. Hefner yang berjudul —Islamizing Java? Religion and Politics in Rural East Javall dalam *The Journal of Asian Studies*, Vol. 46 No. 3 (Agustus 1987) sumber Jstor diakses tanggal 3-9-2012. Dalam artikel ini R. W. Hefner, memaparkan tentang hubungan agama dan politik di pedalaman Jawa Timur tepatnya di pedalaman Pasuruan sebagai basis Islam tradisional Nahdhatul Ulama (NU).

Ketiga, artikel Akh. Muzakki, yang berjudul _Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam Pilpres 2009ll dalam *Jurnal Islamica* Vol. 5 No. 1, 2010. Dalam artikel ini penulis secara khusus mengkritisi politisasi simbol-simbol keagamaan yang dilakukan oleh PKS menjelang pilpres 2009. Di mana PKS memiliki kecenderungan menjadikan Islam sebagai basis

ideology. PKS juga menjadikan agama sebagai instrument politik dalam kepentingan pilpres 2009, seperti pemanfaatan Simbol-simbol agama dan ritual, yang dimanifestasikan dalam simbol-simbol verbal (pesan, bahasa atau istilah, juga simbol dalam bentuk non verbal seperti penampilan sehingga munculah wacana jilbab politik, umrah politik, sampai pada zikir politik.

Keempat, untuk melihat Banten secara holistik dari aspek historis, sosiologis, politik dan ideology, maka penulis melakukan kajian terhadap hasil penelitian Sartono Kartodirdjo “ *the Peasant’ Revolt of Banten 1888*” yang diterjemahkan oleh Hasan Basari menjadi *Pemberontakan Petani Banten 1888*, diterbitkan oleh Dunia Pustaka Jaya, tahun 1984. Buku yang mengupas secara holistik sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di Banten, dalam persepektif rakyat Banten peristiwa tersebut merupakan perjuangan melawan penjajah Belanda, dalam buku ini juga sesungguhnya dapat menggambarkan bagaimana karakter masyarakat Banten.

Kelima, terkait dengan masalah agama dan budaya masyarakat Banten khususnya sebagai kasus, di mana masyarakat Banten memiliki dua figur kepemimpinan yang berpengaruh di masyarakat, yaitu kepemimpinan Kiyai dan Jawara, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya, Tesis, M.A, Tihami

tentang —Kepemimpinan Kiyai dan Jawara di Banten, Tesis Universitas Indonesia, 1992.

Keenam, penelitian Mohammad Hudaeri tentang —Jawara di Banten: Peran, Kedudukan dan Jaringan. (*Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20, No. 97 April – Juni 2003). Penelitian ini menggambarkan bahwa kepemimpinan Jawara sudah memasuki lingkaran politik, ekonomi dan birokrasi, dan lingkaran lainnya dalam jantung kehidupan masyarakat. Di antaranya terpilihnya Rt. Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten yang merupakan anak dari H.Tb. Hasan Sohib sebagai ikon tokoh Jawara.

Ketujuh, terkait dengan persoalan kebijakan pembangunan di Banten, maka dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian Pusat Penelitian ekonomi LIPI tentang —Pilkada dan Pergeseran Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus di Banten, Syarif Hidayat dan Wijaya Adi (ed), Pusat Penelitian Ekonomi LIPI tahun 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa visi/misi yang diusung oleh pasangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah ketika Pilkada berlangsung (nota-benanya dibuat oleh tim sukses) yang pada akhirnya jauh ketika dirumuskan dalam RPJMD, walaupun alasannya telah banyak merujuk pada patensi yang dimiliki oleh daerah (utamanya potensi Sumber Daya Manusia/SDM). Bahkan pada tingkat tertentu, isu SDM,

khususnya terkait dengan persoalan —penyerapan tenaga kerja dan —kemiskinan, telah dijadikan sebagai —iklan politik yang dikemas dalam —janji politik untuk menarik dukungan suara pada kampanye Pilkada.

Kedelepan, penelitian Noorhaidi, dkk, tentang Islam di ruang publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia (2011). Banten merupakan salah satu Propinsi yang memiliki kultur keagamaan yang kuat juga memiliki basis historis keislaman sebagai salah satu kerajaan Islam (kesultanan Banten). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya simbol-simbol Islam di ruang publik tidak bertentangan dengan perkembangan dan proses demokratisasi di Indonesia.

Kesembilan, kajian Khairunnisa, Tesis di UIN Jakarta 2012 yang berjudul Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi Simbol-Simbol Islam pada Ruang Publik di Kota Tangerang. Tesis ini menyimpulkan bahwa penggunaan simbol-simbol Islam sebagai bentuk penegasan identitas pada wilayah yang mayoritas masyarakatnya Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang diterjemahkan oleh pemerintah dalam bentuk PERDA. Keberadaan simbol-simbol tidak mengancam kebebasan masyarakat di luar Islam. Simbol-simbol ini sebagai pagar normatif dan moral dalam menjalankan pemerintahan

maupun kehidupan di mana masyarakat muslim sebagai mayoritas.

F. Kerangka Konseptual

Dalam konteks komunikasi, dugaan sementara biasa dikonstruksi oleh komunikan dalam hubungannya dengan penilaian terhadap kredibilitas komunikator (ethos komunikator). Kredibilitas komunikator terdiri atas tiga hal, yaitu kompetensi (keahlian), moral dan karakter, kesungguhan dan iktikad yang baik.¹³

Ethos komunikator yang pertama dinamakan *prior ethos* dia mana komunikan menduga terhadap kemampuan komunikator sebelum komunikator tampil. Biasanya dilihat informasi atau refrensi awal tentang komunikator yang ditefrima komunikan. Bisa juga dari penampilan fisik, nama, gelar, status, latar belakang dan aksesoris lainnya. Dengan demikian prior ethos merupakan dugaan sementara yang belum tentu demikian kebenarannya. Dugaan selanjutnya akan kredibilitas komunikator adalah disebut *intrinsik ethos* (dugaan yang dilakukan setelah komunikator tampil). Dugaan yang kedua merupakan kebenaran yang sesungguhnya karena sudah

¹³ Onong Uchyana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 351

dibuktikan sendiri oleh komunikan setelah melihat langsung kemampuan komunikator.

Dalam teori komunikasi Lasswell,¹⁴ siapa komunikator, dan siapa komunikan, bagaimana pesannya, dengan menggunakan media apa, dan bagaimana efeknya, dan bagaimana simbol-simbol itu dimaknai oleh komunikator dan komunikan. Idealnya melalui pertukaran simbol itu komunikator dan komunikan saling menafsirkan isi, ucapan dan tindakan sehingga komunikasi berjalan sebagai suatu proses sosial yang adil dan berimbang di mana komunikator dan komunikan sama-sama memiliki andil dalam proses tersebut. Penggunaan simbol-simbol keagamaan yang demikian sakral dan sarat dengan nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, kedamaian bisakah membangkitkan motifasi, rasionalitas, perkembangan, kemajuan dan pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Gaya komunikasi simbolik dengan perangkat dan simbol keagamaan, masih kerap digunakan oleh komponen kekuasaan atau untuk kepentingan kekuasaan sebagai bagian dari komunikasi politik. Secara teoritis komunikasi politik adalah, komunikasi yang dilakukan oleh personal, kelompok maupun

¹⁴ Sebagaimana dikutip Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet ke 15, 2011), 69 – 71.

lembaga yang erat hubungannya dengan politik dan komunikasinya memiliki tujuan politis.

Di era demokrasi, seseorang diberikan kebebasan pilihan berdasarkan penilainnya masing-masing. Namun indikator penilain ini berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang memengaruhi. Bisa jadi bukan semata-mata model pendekatan komunikasi yang dilakukan. Bahkan tidak jarang antara yang dipilih dengan yang memilih tidak pernah saling mengenal atau tahu track recordnya. Singkatnya berdasarkan pandangan yang nampak, seperti Photo atau gambar maupun informasi tentang sosoknya. Hal ini kerap terjadi terutama pada segmen masyarakat kelas bawah, yang tidak bisa membaca atau tidak mengetahuinya. Semata-mata berdasarkan seringnya melihat gambar. Oleh karenanya tidak jarang beberapa kalangan berjibaku dengan pemasangan dan penyebaran gambar sebagai media kampanye, sosialisasi dan pengenalan dirinya ke publik.

Menariknya gambar-gambar yang disebar berubah dari penampilan aslinya. Misalnya terdapat tokoh-tokoh yang tidak pernah berjilbab. Tetapi setelah mencalonkan diri tiba-tiba memasang photo atau gambar dengan mengenakan jilbab. Bahkan ada nama-nama yang terkesan non muslim di mata publik. Untuk meraih pemilih muslim di Banten ia munculkan

namanya yang terkesan Islami dengan nama Ahmad atau sejenisnya. Seperti nama A.J. Desmon Mahesa, kemudian ditampilkan nama depan Ahmad Junaedi. Terlepas apakah itu asli atau kepentingan politik sesaat yang jelas simbol agama menjadi penting dalam membidik konsituen dan perhatian publik di Banten.

Masyarakat Banten dikenal masih cukup memegang teguh identitas keagamaan, baik dari aspek penampilan, tutur kata, siakp perilaku maupun pergaulan dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh agama. Tokoh agama masih menjadi figure sentral dalam dinamikapolitik di Banten. Tidak heran kalau banyak kalangan tidak hanya meminta restu kiyai, ulama, bahkan juga kerap menyambangi pesantrennya untuk menunjukkan kepeduliannya kepada pengembangan pendidikan agama dan institusi keagamaan.

Bahkan yang nota-benanya non muslim saja tidak lepas dari meminta dukungan dan sowan ke pesatren dan kiyai. Seperti yang dilakukan oleh Hary Tanusubidyo ketua partai Perindo yang notabenanya non muslim dan keturunan Tionghoa. Walaupun sikapnya banyak mendapat krtik dari beberapa kalangan. Akan tetapi safarinya ke beberapa pesantren di Banten masih tetap berjalan. Bahkan tidak jarang dengan ikut menggunakan simbol-simbol keagamaan Islam lainnya, seperti

baju koko dan juga sorban tanpa sungkan. Apakah hal itu sudah mengalami pergeseran, di mana simbol hanya dimaknai sebagaipakaian budaya dan tidak lagi theologis dan identitas.

Apakah hal ini sebagai bentuk sikap inklusifitas beragama, atau keterbukan di era demokrasi atau karena saling diuntungkan satu sama lain, atau semata karena sikap saling menghormati dan membantu satu sama lain sebagai makhluk sosial. Yang jelas dinamika dan gebyar simbol keagamaan masih marak sampai kini di Banten.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi Deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis makna simbol (semitok) dan juga interaksionisme simbolik. Hal itu didasarkan pada ide bahwa struktur dan makna diciptakan dan dipelihara dalam interaksi sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan tentang perilaku manusia tidak cukup hanya menangkap dari apa yang nampak, namun harus dapat mengungkap berbagai variabel terkait untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku tersebut. Oleh karenanya menurut Blumer sebagaimana dikutip Deddy Mulyana, di mana pendekatan interaksionisme simbolik harus masuk pada

berbagai lorong untuk menggali sebuah makna perilaku yang sangat terkait dengan berbagai komponen lainnya.¹⁵

Hal yang paling mendasar dalam interaksi simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia yang dipresentasikan lewat simbol dan maknanya, pencarian makna di balik yang sensual menjadi sesuatu yang penting dan utama dalam interaksi simbolik.¹⁶ Cara pandang interaksionisme simbolik didasarkan pada beberapa hal, di antaranya; pertama, Orang mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subyektif tentang situasi yang dihadapi. Kedua, kehidupan sosial sesungguhnya didasarkan pada proses interaksi oleh karenanya ia mengalami perubahan bukan sebuah struktur yang baku. Ketiga, bahasa merupakan hal yang esensial di mana dengan bahasa orang memahami pengalamannya berdasarkan pemaknaan yang diperolehnya dari kelompok primer. Keempat, manusia bertindak didasarkan pada penafsiran terhadap sesuatu obyek yang didefinisikan. Kelima, kesadaran diri juga didasarkan pada definisi yang dihasilkan dari interaksi dengan orang lain.¹⁷

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 152 -154

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000). 183

¹⁷ Lihat Stephen W. Little Jhon – Karen A.Foss, *Theories of Human Communication*, (2009),231,

Interaksionisme simbolik menempatkan komunikasi sebagai proses interaksional yang bersifat konvergen untuk mencapai pengertian bersama (mutual understanding) di antara para partisipan komunikasi.¹⁸ Interaksi simbolik juga merupakan cara pandang terhadap komunikasi dan masyarakat yang pada intinya berfikir bahwa struktur sosial dan makna-makna dicipta dan dilanggengkan melalui interaksi sosial, seperti peran, norma, aturan dan makna-makna dalam suatu kelompok sosial.

Adapun teknik pencarian data dilakukan dengan cara, observasi untuk melihat dan meneliti bentuk-bentuk komunikasi simbol yang digunakan dalam ruang publik di Propinsi Banten. yaitu melihat, mengamati simbol-simbol agama yang terdapat di ruang publik di Propinsi Banten, seputar lambang, gambar, tulisan, aturan, himbauan, penampilan, istilah atau ajakan yang dilakukan oleh komponen komunikator dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan.

Wawancara dengan masyarakat atau komponen komunikasi dalam memahami simbol-simbol keagamaan baik dalam bentuk istilah, gambar, penampilan maupun lambang-lambang yang memiliki makna, baik politis maupun non politis.

¹⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Komunikatif* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 66 -67

Masyarakat terkait sebagai sumber informasi dari berbagai kalangan dan tingkatan pendidikan maupun profesi.

Juga mengkaji dokumen-dokumen terkait, kajian dilakukan terhadap dokumen-dokumen, tulisan, lambang, gambar, media cetak maupun elektronik, maupun aturan terkait penggunaan simbol-simbol agama dalam ruang publik di Propinsi Banten, dalam hal ini dibatasi pada Kota Serang dan Kota Tangerang.

BAB II

AGAMA, SIMBOL DAN KOMUNIKASI POLITIK

A. Simbol Komunikasi dan Komunikasi Politik

1. Definisi Simbol

Para ahli membedakan antara simbol dan tanda. Simbol mempunyai hubungan natural dengan yang ditunjuknya, sedangkan tanda bersifat arbitrer.¹ Simbol seringkali dimaknai juga sebagai tanda, padahal simbol (symbol) dan tanda (sign) merupakan dua hal yang berbeda. Simbol menurut kamus Webster sebagaimana dikutip Afifah dan Zulfitria², adalah sesuatu yang menunjukkan, mewakili atau memberi kesan mengenai sesuatu yang lain di mana sebuah obyek digunakan untuk mewakili sesuatu yang abstrak.

Sedangkan tanda adalah sesuatu yang mengindikasikan suatu kenyataan, kualitas dan lainnya. Tanda juga dapat berarti isyarat atau gerak yang menyampaikan informasi, memberikan perintah, setuju atau tidak setuju seperti anggukan kepala. Melalui simbol dan tanda ini manusia saling memaknai (memberikan tafsiran), persepsi, tanggapan bahkan jawaban

¹ Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi IV (Yogyakarta: Rakesarasin, 2000), 249

² Afifah Harisah dan Zulfitria Masiming, —Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol dan Spasial, *Jurnal SMARTek*, Vol. 6 NO. 1, 2008, 29 -43

terhadap lawan bicara. Dengan demikian simbol dapat tergambar dalam, ucapan, tulisan, benda, tempat, perilaku, sikap, tata cara yang memiliki makna tersirat di balik gambaran atau obyek yang sesungguhnya.

Menurut Arnold M. Rose sebagaimana dikutip Dedy Mulyana,³ Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respon manusia terhadap simbol adalah dalam pengertian makna dan nilainya dalam pengertian stimulasi fisik dari alat-alat inderanya. Suatu simbol dipandang signifikan atau memiliki makna apabila simbol membangkitkan individu yang menyampaikannya memiliki respon yang sama seperti juga pada orang yang dituju.

Sedangkan menurut George Herbert Mead, simbol dibedakan dalam dua hal, pertama *significant symbols* dan kedua *natural sign*, yang pertama digunakan secara sengaja sebagai tanda komunikasi. Sedangkan yang kedua digunakan secara spontan dalam merespon stimuli. Simbol secara sembarang

³ Lihat Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Rosdakarya, cet ke-6, 2008), 77 -78

dipilih dan berdasarkan kesepakatan yang tidak memiliki hubungan kausal.⁴

Dengan demikian simbol merupakan sesuatu yang memiliki makna tersirat (tersembunyi) di balik gambaran atau obyek yang sesungguhnya. Simbol merupakan representasi dari fenomena atau realitas, oleh karenanya simbol dapat memiliki makna ketika dipersepsi dan berada pada orang yang memiliki makna yang sama, baik dari aspek budaya, agama, ideology dan sebagainya. Sebab bisa jadi sesuatu benda atau tempat dan istilah tertentu yang menjadi simbol sakral bagi kelompok tertentu justru tidak bermakna apa-apa bagi kelompok yang lainnya oleh karena sebuah keyakinan, ideology atau budaya yang berbeda.

Manusia sangat lekat dengan simbol, oleh karenanya manusia juga disebut sebagai *homo symbolicum*. Semua aspek kehidupan manusia tidak lepas dari simbol, baik dalam hubungannya dengan status sosial, ekonomi, budaya, ideology dan juga agama. Kehidupan keberagamaan tidak dapat melepaskan diri dari simbolisme, walaupun inti emosi keagamaan sesungguhnya tidak dapat diekspresikan. Simbol keagamaan setidaknya menggambarkan tentang hal itu, di mana

⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya*, 78

simbol-simbol itu mampu membangkitkan perasaan dan keterikatan lebih dari sekedar formulasi verbal dari sesuatu yang dipercaya sebagai simbol yang memiliki makna tertentu dan sangat berarti.

Menurut Elizabeth K. Notingham, simbol (lambang) keagamaan dalam sepanjang sejarah merupakan pendorong yang paling kuat bagi timbulnya perasaan manusia, bahkan pemaknaan dan pemilikan lambang secara bersama merupakan cara yang sangat efektif untuk mempererat persatuan umat beragama.⁵

Menurut Clifford Geertz⁶, penggunaan sesuatu yang bersifat simbolis merupakan peristiwa sosial, ia bersifat publik dalam masyarakat dan agamanya. Agama sebagai sistem budaya merupakan sistem simbolik yang menawarkan cara untuk mempersepsi dunia. Simbol-simbol keagamaan bisa nampak dalam berbagai bentuk seperti, ritual, do'a, bahasa atau istilah yang memiliki makna khusus, maupun benda-benda yang memiliki makna tertentu, tempat-tempat yang juga memiliki nilai sakral termasuk juga tokoh atau manusia yang dianggap memiliki nilai kesucian dan otoritas. Ajaran agama diungkap

⁵ Elizabeth K. Notingham, *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18 -19

⁶ Clifford Geertz, *The interpretation of Culture*, (New York: Basic Book, 1973).

dalam bentuk simbol-simbol yang tentu saja berbeda antara agama yang satu dengan lainnya.

Penggunaan simbol-simbol keagamaan pada ruang publik banyak dilakukan bukan hanya sebagai penunjuk identitas maupun seruan keagamaan semata sebagai (bahasa dakwah), namun memiliki makna pada lingkup yang lebih luas. Ia bisa dimaknai sebagai ajakan dalam bentuk untuk memengaruhi yang digunakan sebagai bahasa iklan yang ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan dalam produk.⁷ Simbol-simbol keagamaan juga dilakukan bukan sekedar untuk memengaruhi namun juga menarik simpati dan mendapat legitimasi juga justifikasi (pembenaran) seperti yang banyak dilakukan dalam panggung politik.

Dalam persepektif komunikasi simbol-simbol penampilan, aksesoris bahkan gerakan dan paralinguistik memiliki arti tersendiri.⁸ Gaya berbusana (muslimah) misalnya dapat dimaknai sebagai citra muslimah yang solehah, sorban dan peci juga dapat dimaknai sebagai pria yang alim, pergaulan yang dekat dengan otoritas keagamaan (kiyai dan ulama) dapat

⁷ Abbas Naseri dan Ezhar Tamam, —Impact of Islamic Religious Symbol In Producing Favorable Attitude Toward Advertisementl, *The Public Administration and Social Policies Review*, IV Year, No. 1, Juni 2012 . http://www.uwg/revald/files/nr8/7-20_nasr.pdf. (diakses: 8 / 12 / 2012)

⁸ Lebih jelas tentang hal tersebut lihat Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 129 -132

dicerminkan pemimpin yang lurus dan berada pada jalan kebenaran karena selalu mendapat bimbingan dan nasehat dari tokoh-tokoh agama. Dengan banyak membangun sarana, fasilitas institusi keagamaan, pesantren, masjid, majelis taklim, memberikan bantuan ibadah haji dan umrah pada tokoh-tokoh agama dapat dipahami sebagai citra pemimpin yang peduli terhadap pembangunan kehidupan keagamaan.

Demikian juga dengan pengucapan dalil-dalil keagamaan yang diucapkan lancar dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang luas sehingga dapat dipersepsi perilakunya benar dan ketika dihubungkan dengan sikap kepemimpinan akan dapat dimaknai bisa amanah, karena faham dan mengerti agama maka ia akan takut Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan tidak akan memakan harta haram (korupsi). pemaknaan demikian merupakan makna komunikasi dalam ranah persepsi (dugaan sementara).

Dalam konteks komunikasi dugaan sementara biasa dikonstruksi oleh komunikan dalam hubungannya dengan penilaian terhadap kredibilitas komunikator (ethos komunikator). Kredibilitas komunikator terdiri atas tiga hal, yaitu kompetensi (keahlian), moral dan karakter, kesungguhan

dan iktikad yang baik.⁹ Ethos komunikator yang pertama dinamakan *prior ethos* dia mana komunikan menduga terhadap kemampuan komunikator sebelum komunikator tampil. Biasanya dilihat informasi atau refrensi awal tentang komunikator yang ditefrima komunikan. Bisa juga dari penampilan fisik, nama, gelar, status, latar belakang dan aksesoris lainnya. Dengan demikian *prior ethos* merupakan dugaan sementara yang belum tentu demikian kebenarannya. Dugaan selanjutnya akan kredibilitas komunikator adalah disebut *intrinsik ethos* (dugaan yang dilakukan setelah komunikator tampil). Dugaan yang kedua merupakan kebenaran yang sesungguhnya karena sudah dibuktikan sendiri oleh komunikan setelah melihat langsung kemampuan komunikator.

Meraih pemenuhan dan dapat mempengaruhi orang lain adalah tujuan komunikasi secara umum baik dalam hubungannya dengan komunikasi antarpersonal maupun dalam komunikasi publik dan organisasi. Dalam komunikasi publik seorang komunikator berusaha menarik dan memengaruhi halayak (komunikan). Pada tahap awal komunikator mengkonstruksi pesan agar sampai kepada komunikan yang kemudian ditransmisikan melalui media.

⁹ Onong Uchyana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 351

Tujuan tahap awal sekedar memberikan informasi. Setelah informasi diterima, dipahami dan dimaknai komunikan, maka komunikan dapat terpengaruh dengan pesan komunikator. Maka pesan yang sampai dimaknai dengan melahirkan sikap (menerima atau menolak) dan perilaku sudah dalam bentuk tindakan.

Dalam rumus komunikasi efektif, menurut Stewar L. Tubbs dan Sylvia Moss sebagaimana dikutip Jalaluddin Rahmat,¹⁰ komunikasi efektif setidaknya memiliki indikator dan menimbulkan lima hal ; pengertian, kesenangan (lawan bicara), pengaruh, hubungan yang makin baik, dan menimbulkan tindakan yang baik pula. Tahapan itu mengalami proses secara psikologis dan juga sosiologis. Bila dalam tahapan psikologis ada pada diri komunikator maupun komunikan. Pada tahapan sosiologis, hal itu ditujukan dan dimanifestasikan secara sosial dalam komunikasi interpersonal, kelompok maupun massa.

¹⁰ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, edisi revisi (Bandung: Rosdakarya, 2001)

2. Komunikasi Politik

Komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses simbolik, di mana lambang atau simbol-simbol yang dimunculkan diberikan makna, oleh karenanya simbol merupakan sesuatu yang melekat pada setiap proses komunikasi. Baik simbol dalam bentuk verbal, non verbal, visual maupun gestur. Setiap proses komunikasi sebenarnya merupakan proses memaknai simbol-simbol tersebut. Simbol merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjuk atau mewakili sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹ Demikian juga dalam komunikasi politik, sebagai salah satu bidang kajian yang erat kaitannya dengan segala bentuk, institusi, personal maupun, aktifitas dan tujuan politik.

Secara istilah komunikasi politik berarti, komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara —yang memerintah dan —yang diperintah.

¹¹ Deddy Mulyana, *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 79.

Menurut Mochtar Pabotinggi¹² dalam prakteknya, komunikasi politik sering mengalami empat distorsi. Pertama, distorsi bahasa. Sehingga terkesan —eupimisme‡ penghalusan bahasa bahkan cenderung manipulasi atau membuat —topeng‡. Bahasa yang digunakan tidak sejujurnya. Salah satu contoh misalnya bahasa yang digunakan oleh penguasa untuk penggusuran dengan penertiban.

Kedua, bahasa sebagai —proyek lupa‡; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang. Misalnya, konsep Nawacita pemerintahan Jokowi pada saat kampanye, realitasnya justru sebaliknya. Angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat, sementara dalam sisi lain ia menerima pekerja asing (China) untuk pekerjaan biasa. Banyak janji-janji kampanye pemimpin yang kerap kali diingkari setelah menjabat. Namun dikemas dengan bahasa yang menyimpang untuk menutupi kelemahannya.

Ketiga, bahasa sebagai representasi. Hal itu dilakukan untuk melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Gambaran buruk citra kaum Muslim oleh media-media Barat

¹² Mochtar Pabotinggi —Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik‡ dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, ed. *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Jakarta: Garamedia, 1993).

dan kroninya. Sementara aspek kebaikan minim sekali mendapat perhatian. Contoh hangat dalam konteks lokal misalnya, kasus razia warung nasi yang buka pada siang hari oleh Satpol PP di Kota Serang Banten sebagai penegakan PERDA. Media Kompas yang kerap dianggap sebagai media corong Gereja dan anti Islam, memblow-up peristiwa itu seolah-olah sebagai sebuah pelanggaran HAM. Sampai-sampai Presiden turun tangan memberikan bantuan. Sementara untuk peristiwa lain yang lebih menyayat perasaan rakyat kecil seperti pengusuran tidak berimbang beritanya dan pemimpin negeri diam saja.

Keempat, distorsi bahasa sebagai —ideologi. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang—monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat. Dalam hal ini Politik hanya identik sebagai jembatan kekuasaan yang minim dengan etika dan politik yang mendidik, baik bagi internal partai maupun masyarakat luas. Sehingga seakan-akan dibenarkan cara-cara

kotor dalam meraih kekuasaan, karena hampir semua elemen Partai melakukan cara-cara demikian, walaupun salah.

Perkembangan ilmu politik seiring dengan perkembangan politik itu sendiri. Misalnya munculnya istilah seperti —Ganyang Malaysia!, Nasakom pada masa Orde lama. Demikian juga pada masa Pemerintahan Orde baru, —waspada bahaya laten Komunis!, Pancasila atau juga melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekwen, merupakan bentuk komunikasi politik.

Namun demikian sebagai sebuah ilmu dan keterampilan praktis perkembangannya mulai nampak pasca tumbangnyanya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Di mana komunikasi politik menjadi berkembang pesat dan banyak diminati, terutama setelah media menjadikan hal itu juga sebagai komoditas publik. Munculah istilah-istilah baru dalam komunikasi politik, seperti Pencitraan, Partai Wong Cilik (PDIP), Blusukan (Jokowi).

Pencitraan, muncul karena intensitas media yang menggambarkan demikian. Komunikasi politik tidak dapat menampik dari kesan pencitraan yang dibangun untuk dikenal dan memengaruhi pilihan dan sikap publik.

Citra adalah dunia menurut persepsi kita, atau *pictures in our head*. Dari sudut pandang ilmu sosial, salah satu pendekatan teoritik tentang penciptaan citra adalah *impression management*-

manajemen kesan-dimana citra dipandang sebagai kesan seseorang atau suatu organisasi terhadap sesuatu atau seseorang, lembaga dan lainnya.

Menurut Dan Nimmo,¹³ citra adalah segala hal yang berkaitan dengan situasi keseharian seseorang; menyangkut pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu. Sehingga citra dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu. Teori *image building* menyebutkan bahwa, citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra), masuk ke saringan perhatian (*attention filter*), dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (*perceived message*), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra.

Sebagai bagian dari komunikasi politik, pencitraan politik memang dilakukan secara persuasif untuk memperluas wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Baik figur-figur yang bersih maupun bermasalah (*notorious*) sama-sama secara substansial bekerja keras membangun citra politik untuk mempengaruhi pemilih.

¹³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung: Remadja Karya, 1989), 7.

B. Agama dan Simbol Sebuah Makna Komunikasi

Agama sebagai sistem kepercayaan dikenal memiliki rangkaian sistem simbol. Simbol-simbol itu dimanifestasikan sebagai jembatan manusia dalam memahami sesuatu di balik yang nampak. Simbol itu digambarkan sebagaimana sistem religinya. Setiap agama memiliki simbolnya masing-masing yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya.¹⁴ Walaupun di antaranya memiliki kesamaan simbol akan tetapi pemaknaannya jelas berbeda karena sistem kepercayaan yang berbeda. Hal itu berlaku tidak hanya bagi agama-agama besar akan tetapi semua sistem kepercayaan, memiliki serangkaian proses simbol.

Ajaran agama meyakini tentang sesuatu yang sakral dan suci. Kepercayaan dan ritual sebagai persembahan kepada yang suci dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk simbolis. Demikian juga dalam Islam sarat dengan simbol baik dalam bentuk ritual, doa menyangkut tempat dan tata caranya yang digambarkan secara simbolik. Seperti dalam tata cara berdo'a dengan cara mengangkat kedua belah tangan ke atas. Demikian juga dalam tata cara ritual (ibadah), seperti dalam ibadah shalat dan haji misalnya sarat dengan simbol-simbol. namun demikian simbol-

¹⁴ Ayatullah Humaeni, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Magi Banten* (Serang: Bantenologi, 2014), 61

simbol dalam hubungannya dengan ibadah dalam Islam bukan didasarkan kepada kebebasan manusia namun didasarkan pada perintah Allah berdasarkan wahyu (al-Qur'an) sabda dan penjelasan Rasulullah.¹⁵

Demikian juga dengan ritual ibadah haji dimana umat muslim mengunjungi Ka'bah sebagai kiblat orang Islam adalah simbol yang memiliki makna sakral sebagai tempat suci (baitullah). Demikian juga ketika menggunakan pakaian ihram (harus putih dan tidak berjahit) adalah simbol. Demikian juga dalam praktik-praktik ritual seperti thawaf dan sa'I semuanya memiliki makna simbolik.¹⁶

Bagi fenomenolog agama mereka berusaha menggali makna dan mengkaji tradisi, simbol keagamaan. Seperti tradisi sa'I di mana muslim melakukan lari-lari kecil dan thawaf dengan cara mengelilingi ka'bah menjadi fenomena sendiri, di mana hal itu dilakukan karena alasan-alasan religius dan juga dipahami sebagai cara dalam memperoleh pengalaman religius.¹⁷

¹⁵ Ibadah shalat dan haji beserta tata caranya adalah berdasarkan wahyu dan sabda Nabi Muhammad Saw dan ketetapanannya yang wajib diikuti oleh umatnya.

¹⁶ Ali Syari'ati, *Makna Haji* (Jakarta: Zahra Publishing, 2001), edisi Indonesia.

¹⁷ Marcel Maus seorang etnolog banyak melakukan kajian tentang —fenomena gerakanl sebagaiman ajuga Tworuschka seorang fenomenolog yang mengkaji fenomena gerakan, di mana cara berjalan dan berlari bagi

Agama diakui merupakan sesuatu yang prinsipil bagi manusia dan terkait erat dengan perilaku dan pengalaman hidup manusia. Agama memberikan lambang-lambang sehingga bisa digambarkan dan dimaknai, karena ia terkait dengan pemahaman dan penghayatan yang bersifat individual maka agama merupakan satu istilah yang sulit untuk didefinisikan, dan walaupun ada akan berbeda-beda dalam memaknai agama tergantung dari persepektif apa ia didekati.¹⁸

Di antaranya definisi agama menurut Julian Huxley, sebagaimana dikutip Nurkholis Madjid, bahwa realitas agama yang esensial adalah pengalaman khusus yang berusaha menyatakan dirinya dalam simbol-simbol dan pernyataan intelektualnya dalam theology dan terdapat keyakinan akan adanya rasa kesucian, dan hal itu hanya dapat dikomunikasikan kepada orang yang memiliki pengalaman dan makna yang sama.¹⁹

komunitas agama dalam ritus berbeda dengan dengan cara berjalan dan berlari biasa, demikian juga cara duduk dan lingkaran orang yang sedang melakukan ritual meditasi berbeda dengan cara duduk dan lingkaran biasa yang bukan bermakna ritual.. Sebagaimana dikutip Clive Erricker, —Fenomenological Approaches!, Peter Connoly (ed), *Approachea to the Study of Religion*, (London and New York ; Cassel, 1999), 132-133

¹⁸ Eizabeth K. Notingham, *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong (Jakarta: Rajawali, 1992)

¹⁹ Nurkholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), 122.

Agama dan budaya hadir memberikan simbol-simbol di mana antara agama, budaya yang satu dengan yang lainnya memiliki simbol yang berbeda-beda. Simbol-simbol agama merupakan media penghubungan antara pemeluk dengan Tuhannya. Atau yang menghubungkan dunia kemanusiaan dengan yang supranatural. Dalam pandangan Mircea Eliade dalam karyanya *Myte and Reality* sebagaimana dikutip Clive Erricker,²⁰ di mana manusia yang terikat dengan segala yang profane menghubungkan dirinya dengan yang suci melalui simbol-simbol.

Simbol-simbol agama bukan hanya sebagai makna ritual yang menghubungkan yang profane dengan yang suci. Sebagaimana ditemukan dalam beragam ritus agama-agama, baik yang bersumber berdasarkan kitab suci maupun penafsiran. Semua agama tidak sepi dari ritual yang simbolik, artinya yang nampak tergambar secara fisik dan dapat ditangkap maknanya.

Salah satu contohnya dalam ritual atau ibadah wajib umat Islam, seperti haji misalnya. Ibadah yang membutuhkan ekstra energy, biaya dan waktu dengan rangkaian tahapan yang sangat simbolik. Seperti Thawaf mengitari Ka'bah dengan tujuh kailiputaran. Sa'I berlari-lari kecil dari bukit Shafa

²⁰ Clive Erricker — *Fenomenological Aproachesl*, Peter Conolly (ed), *Approaches to The Study of Religion*, (London and New York: Cassell, 1999), 76

ke bukit Marwah juga sebanyak 7 kali. Mencukur rambut atau tahalul, setelah selesai melaksanakan rangkaian umrah dan haji. Melempar jumrah dengan kerikil pada tempat tertentu dan jumlah tertentu. Menggunakan kain ihram dan wukuf di padang arafah. Semua itu dilakukan dengan simbol-simbol fisik yang sangat dalam maknanya. Dalam hal ini Ali Syari'ati mengelaborasi makna simbolik proses perjalanan ibadah haji yang sangat dalam untuk mencapai makna yang sebenarnya. Dalam arti tidak berhenti pada pelaksanaan ritual atau ibadah simbolik semata. Dengan memahami makna di balik simbol, maka dapat mengerti dan menghayati makna ibadah yang sesungguhnya.²¹

Simbol agama, tidak hanya terkait dengan yang sesuatu yang menjadi ritual. Akan tetapi juga terkait dengan beragama, proses, tindakan, penampilan dan juga tempat tertentu dan cara tertentu, baik yang dipahami secara normativ dari sumber-sumber agama, maupun yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.

Termasuk dalam kategori ini misalnya dalam bentuk penggunaan pakaian busana islami, jilbab, hijab dan sejenisnya bagi kaum perempuan muslimah. Sementara bagi laki-laki

²¹ Lihat, Ali Syari'ati, *Makna Haji* (Jakarta: Zahra Publishing, 2001), edisi Indonesia.

seperti pakaian Koko, gamis seperti orang Arab, peci putih, peci hitam maupun surban. Pakaian demikian memiliki simbol keagamaan yang secara sosial meletakkan pemakai pada kelas tertentu secara keagamaan. Misalnya, santri, alim, agamis, shalih, haji, tokoh agama dan semacamnya.

Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang diperingati secara turun temurun sebagai warisan tradisi. Tidak hanya memiliki makna budaya dan tradisi semata, akan tetapi juga menjadi makna theologis akan tetapi juga sosiologis. Pemaknaan sosiologis terhadap berbagai peristiwa baik ritual agama, maupun tradisi dan juga penampilan menjadi kepingan simbol yang menjadi simpul sosial, baik status sosial, penghormatan, kekuasaan maupun pengaruh. Karena simbol-simbol agama bukan lagi menjadi relasi theologis. Akan tetapi lebih kepada relasi sosialnya yang menjadi sumber pemahaman dan pemaknaan dalam kehidupan sosial masyarakat secara implementatif.

Dalam kehidupan sosial, pemahaman dan pemaknaan terhadap simbol agama sangat beragam. Ada kelompok yang sangat mengagungkan simbol karena menganggap simbol adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari isi atau bahkan ajaran agama. Kedua, kelompok yang tidak lagi terikat dengan makna lahiriyah atau simbolik, karena simbol ada yang benar-

benar secara normativ sebagai bagian dari agama, ada juga yang lahir karena sistem budaya. Kelompok ketiga, terdapat kelompok yang tidak lagi melihat simbol semata, namun lebih memahami isi.

Kelompok pertama, masih terfokus pada aspek simbolik lahiriyah, sehingga cenderung mengagumi atau mengkultuskan sesuatu yang memiliki simbol-simbol tertentu. Mereka akan lebih tertarik pada penampilan simbolik. Misalnya berdasarkan penampilan dan pakaian, dipandang lebih islami dan alim orang yang menggunakan jubah, gamis, surban. Islami kerap kali identic dengan ke –Araban atau yang secara tradisional dipahami sebagai kebiasaan yang melekat pada sosok orang yang agamis. Sebaliknya penampilan yang trendi, kekinian atau menyontek gaya Barat misalnya, maka akan dicap tidak islami. Pakaian celana levis, kemeja, atau kaos, walaupun secara fisik menutup aurat, pasti akan dinilai jauh dari kesan-kesan keagamaan.

Kelompok kedua, kelompok yang tidak lagi semata-mata melihat simbol dan tampilan luar, akan tetapi mengkombain antara simbol dengan isi. Dalam hal ini simbol hanya menjadi perantara awal untuk melihat sisi dalamnya. Ketika terjadi kontradiksi antara simbol dan isi, kelompok ini lebih cenderung akan memilih isi. Dalam kontek kampanye atau bentuk

komunikasi politik, maka yang akan dilihat lebih intensif adalah isi dan perilaku di banding dengan kemasan.

Sedangkan kelompok ketiga, cenderung mengabaikan simbol lebih berorientasi kepada isi semata. Tidak lagi terikat pada simbol termasuk simbol agama bahkan identitas agama. Dalam komunikasi politik kelompok ini cenderung mendasarkan pada isi dan keberanian atau gebrakan dalam perubahan. Seperti, kelompok pendukung Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI. Walaupun dari aspek komunikasi dan sikapnya yang arogan, namun karena dianggap berani oleh kelompok yang menginginkan perubahan, tidak lagi terpaku pada simbol-simbol fisik, identitas, etnis apalagi kagamaan.

C. Agama, Budaya dan Politik: Manifestasi Politik Simbol

Relasi agama, budaya dan politik menjadi salah satu tema sentral dalam berbagai persepektif keilmuan, seperti dalam kajian antropologi, sosiologi, politik, dan studi agama. Agama dan budaya seperti kepingan mata uang yang sulit dipisahkan. Walaupun sesungguhnya keduanya berbeda, namun keduanya saling tergantung dan melengkapi, di mana budaya dapat memengaruhi agama demikian juga agama dapat memengaruhi budaya. Seringkali sulit dibedakan mana yang murni agama tanpa unsur dan keterlibatan budaya, karena implementasi

agama selalu melibatkan unsur budaya.²² Termasuk juga dalam penyebaran agama atau dakwah tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan asli di mana agama itu berkembang.²³

Demikian juga agama dan politik sesungguhnya merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia dan menjadi hal yang sangat primordial, keduanya sudah hadir dan diterima sejak manusia lahir. Menurut Komaruddin Hidayat kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang harus diterima dan manusia tidak bisa menolaknya.²⁴ Oleh karenanya karakter manusia sangat ditentukan oleh agama dan budayanya, baik pemikiran, sikap perilaku dalam berbagai dimensi dan manifestasinya. Salah satu manifestasinya adalah dalam kehidupan politik.

Cliford Geertz misalnya telah meyakinkan para akademisi kemudian bahwa ada hubungan yang signifikan antara budaya, agama dan afiliasi politik. Di mana budaya priyayi dihubungkan dengan PNI, kaum abangan dalam PKI dan

²² Untuk melihat bagaimana hubungan agama dan budaya lihat Abdurahman Wahid, *Pergulatan, Agama, Negara dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001)

²³ Kees Van Dijk, —*Dakwah and Indigenous Culture: The Dissemination of Islam*—, *Bijdragen de Taal-Land-en Volkenkunde*, Vol. 154 No.2, P. 218-235 *Globalization Localization and Indonesia* (1998), <http://www.Jstor.org./stable/27865428> (diakses:04/09/2012)

²⁴ Lihat Komaruddin Hidayat, —*Agama, Etnisitas dan Politik*l, *Koran Seputar Indonesia*, 5 Desember, 2008.

kaum santri dengan Masyumi.²⁵ Walaupun kemudian banyak akademisi belakangan mengkritik pandangan dan kategorisasi masyarakat Jawa menurut Geertz. Seperti Ricklefs dan banyak lainnya sebagaimana dikutip Bambang Pranowo,²⁶ demikian juga Kuntowijoyo, di mana menurutnya, tidak ada perbedaan yang tajam dalam orientasi budaya antara PNI dan PKI dan juga tidak jelas perbedaan yang konsisten antara priyayi dan abangan.²⁷

Dalam kajian lainnya ternyata bukan hanya agama dan budaya yang memiliki signifikansi terhadap pandangan dan afiliasi politik, tetapi juga politik kebijakan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap wajah keberagamaan di mana telah terjadi *funksionalisasi agama* dalam kancah politik. Dimana bahasa-bahasa kebijakan dan politik menggunakan kemasan bahasa agama (seperti iman, takwa, akhlakul karimah) dan juga terjadinya control otoritas kekuasaan yang kuat terhadap kehidupan keberagamaan dan dakwah melalui lembaga

²⁵ Lihat, Clifford Geertz, *Religion of Java* (New York: The Free Press of Glencoe, 1960).

²⁶ Lihat hasil penelitian Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011).

²⁷ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Intepretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991).

negara.²⁸ Contoh konkrit dalam hal ini adalah konsep —dakwah pembangunan yang menjadi ikon salah satu komunikasi politik buatan pemerintahan orde baru. Di samping juga secara eksplisit banyak munculnya partai berbasis agama yang konon dapat menjadi media penyaluran aspirasi umat Islam untuk dapat mewujudkan beberapa agenda umat.²⁹ Politik Islam sesungguhnya tidak dapat menghindarkan diri dari problem-problem sektarian dan kepentingan ideologi.³⁰

Kondisi demikian erat hubungannya dengan relasi politik dan agama (Islam). Hubungan Islam dan politik di Indonesia selalu menarik untuk diperbincangkan dari dulu hingga sekarang. Selain karena umat Islam menjadi warga mayoritas di negeri ini, juga karena aspirasi politik umat Islam di Indonesia tidaklah bersifat homogen. Aspirasi politik umat Islam di Indonesia sangat heterogen dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan, semenjak era sebelum kemerdekaan, aspirasi

²⁸ Johan Meuleman, — Dakwah Competitions for Authority and Development, *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde*, Vol. 167. No. 2/3, 2011, 236 – 269, <http://www.jstor.org> (diakses ; 03/09/2012) .

²⁹ Anies R. Baswedan, — Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory, *Asian Survey*, Vol.44 No.5 (September-Oktober 2004), P. 669-690. http://www.jstor.org/stable/10.15.25/as_2004.44.5.669. (diakses, 04/09/2012).

³⁰ Lihat book review, JayTolson — Islam's Political Problem the Flight of the Intellectual, by Paul Berman and The Other Muslim: Moderat and Secular, by Zeyno Baron, *The Wilson Quarterly*, vol.34. No. 3 (2010.), P. 45 -98 <http://www.jstor.org/stable/41000986> (diakses 04 / 09/2012).

politik umat Islam di pentas politik nasional tidaklah tunggal. Sampai saat ini aspirasi politik umat Islam sangat berfariatif. Perbedaan pilihan dan pandangan politik masih mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia.

Sebagaimana diketahui umat Islam adalah pemeluk mayoritas di negeri ini. Sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, sebagian kaum Muslim mendesak bahwa Islam haruslah berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan keistimewaan di bidang politik. Ketika menjelang kemerdekaan, meskipun para pendiri bangsa ini menerima Pancasila sebagai dasar negara, namun ada sebagian dari mereka yang meminta agar posisi Islam tercantum secara eksplisit dalam Konstitusi negara ini.

Aspirasi itu tercantum dalam Piagam Jakarta yang mendukung Pancasila sebagai Dasar Negara, namun dengan penambahan kata-kata —Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta yang awalnya disetujui masuk dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk kompromi dengan umat Islam itu, ternyata tidak diterima secara bulat oleh anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Beberapa anggota dari kelompok sekuler dan nasionalis tidak menyetujuinya. Sehingga, pada 18 Agustus 1945, setelah para anggota BPUPKI dari kelompok Islam didekati dan dilobi oleh para anggota dari kelompok

nasionalis dan non Muslim, akhirnya Piagam Jakarta ditarik dari Pembukaan UUD 1945.

Kompromi politik ini dilakukan karena saat itu ada ancaman bahwa Indonesia bagian Timur akan memisahkan diri dari Indonesia jika Piagam Jakarta itu tetap dicantumkan. Jadi, kelompok Islam menyetujui pencabutan karena demi menyelamatkan bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kompromi lebih lanjutnya, Sila Pertama dari Pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun para founding fathers dari kalangan Islam saat itu menyetujui tentang penarikan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945, namun tidak semua umat Islam menyetujui kompromi politik itu. Bagi sebagian tokoh dan umat Islam, penarikan Piagam Jakarta adalah awal mula kekalahan umat Islam di pentas politik nasional yang terus berlanjut hingga hari ini. Oleh karenanya, aspirasi untuk menegakkan syariat Islam terus terjadi dan dilakukan terus menerus, semenjak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi.

Menurut mereka, aspirasi umat Islam dalam politik nasional secara formal adalah sebuah keharusan. Sebab, umat Islam adalah pemilik saham mayoritas dalam pendirian bangsa ini, dan aspirasi itu, terus digelorkan dan diperjuangkan, baik secara formal maupun non formal. Bagi sebagian umat Islam

yang lain, penarikan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari konsensus nasional bahwa Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara multireligius dan multietnis yang tidak mengistimewakan agama dan suku tertentu. Oleh karena itu, bagi mereka Pancasila sudah berkesesuaian dengan ajaran Islam. Syariat Islam juga tidak perlu dicantumkan secara formal sebagai dasar negara maupun dalam hukum formal negara. Bagi kelompok ini, meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun negara tidak membatasi aspirasi umat Islam.³¹

Relasi agama, budaya dan politik menjadi salah satu tema sentral dalam berbagai persepektif keilmuan, seperti dalam kajian antropologi, sosiologi, politik, dan studi agama. Agama dan budaya seperti kepingan mata uang yang sulit dipisahkan, walaupun sesungguhnya keduanya berbeda, namun keduanya saling tergantung dan melengkapi, di mana budaya dapat mempengaruhi agama demikian juga agama dapat memengaruhi budaya, sehingga seringkali sulit dibedakan mana yang murni agama tanpa unsur dan keterlibatan budaya, karena

³¹ A. Fuad Fanani & M. Abdullah Darraz, —Membaca Ulang Ekspresi Politik Umat Islam: Sebuah Pengantar!, *Jurnal Maarif*, Vol 8 No. 2, Desember 2013.

implementasi agama selalu melibatkan unsur budaya.³² Termasuk juga dalam penyebaran agama atau dakwah tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan asli di mana agama itu berkembang.³³

Piagam Jakarta yang awalnya disetujui masuk dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk kompromi dengan umat Islam itu, ternyata tidak diterima secara bulat oleh anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Beberapa anggota dari kelompok sekuler dan nasionalis tidak menyetujuinya. Sehingga, pada 18 Agustus 1945, setelah para anggota BPUPKI dari kelompok Islam didekati dan dilobi oleh para anggota dari kelompok nasionalis dan non Muslim, akhirnya Piagam Jakarta ditarik dari Pembukaan UUD 1945. Kompromi politik ini dilakukan karena saat itu ada ancaman bahwa Indonesia bagian Timur akan memisahkan diri dari Indonesia jika Piagam Jakarta itu tetap dicantumkan. Jadi, kelompok Islam menyetujui pencabutan karena demi menyelamatkan bangsa dan kepentingan nasional.

³² Untuk melihat bagaimana hubungan agama dan budaya lihat Abdurahman Wahid, *Pergulatan, Agama, Negara dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001)

³³ Kees Van Dijk, —*Dakwah and Indigenous Culture: The Dissemination of Islam*—, *Bijdragen de Taal-Land-en Volkenkunde*, Vol. 154 No.2, P. 218-235 *Globalization Localization and Indonesia* (1998), <http://www.Jstor.org./stable/27865428> (diakses:04/09/2012)

Sebagai kompromi lebih lanjutnya, Sila Pertama dari Pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun para founding fathers dari kalangan Islam saat itu menyetujui tentang penarikan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945, namun tidak semua umat Islam menyetujui kompromi politik itu. Bagi sebagian tokoh dan umat Islam, penarikan Piagam Jakarta adalah awal mula kekalahan umat Islam di pentas politik nasional yang terus berlanjut hingga hari ini. Oleh karenanya, aspirasi untuk menegakkan syariat Islam terus terjadi dan dilakukan terus menerus, semenjak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Menurut mereka, aspirasi umat Islam dalam politik nasional secara formal adalah sebuah keharusan. Sebab, umat Islam adalah pemilik saham mayoritas dalam pendirian bangsa ini, aspirasi itu terus digelorakan dan diperjuangkan, baik secara formal maupun non formal.

Bagi sebagian umat Islam yang lain, penarikan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari konsensus nasional bahwa Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara multireligius dan multietnis yang tidak mengistimewakan agama dan suku tertentu. Oleh karena itu, bagi mereka Pancasila sudah berkesesuaian dengan ajaran Islam. Syariat Islam juga tidak

perlu dicantumkan secara formal sebagai dasar negara maupun dalam hukum formal negara. Bagi kelompok ini, meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun negara tidak membatasi aspirasi umat Islam dan memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berkembang serta menjamin hak-hak sosial dan politiknya. Berdasarkan cara pandang seperti ini, dalam beberapa hal aspirasi politik kelompok ini berbenturan atau bersinggungan dengan kelompok Islamis yang disebutkan di atas.

Dua Kutub Politik Islam di Indonesia Dalam peta politik Islam kontemporer, terutama pasca reformasi, kontestasi antara kelompok Islam politik dan politik Islam –atau antara Islam formalis dan Islam substantif– terus terjadi dan berjalan secara dinamis.

Kelompok Islamis atau dikenal juga dengan Islam Politik atau sering pula disebut sebagai kelompok Islam Syariat dalam karya Haedar Nashir adalah sebuah kelompok dalam umat Islam yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal, meyakini Islam sebagai sebuah keyakinan hidup (belief system) yang sempurna, dan mencita-citakan berdirinya sebuah sistem Islam atau Islamic state, terus berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Kelompok Islam politik ini dalam banyak hal diwakili oleh kelompok Muslim oleh sebagian orang

disebut sebagai bagian dari Islam transnasional. Kelompok ini banyak beraktivitas dalam organisasi seperti: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan kelompok Tarbiyah yang banyak berinduk dalam PKS (Partai Keadilan Sejahtera).³⁴

Dalam beberapa hal, partai politik Islam seperti PBB (Partai Bulan Bintang) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), juga dikelompokkan dalam kelompok ini. Kedua partai inilah yang ketika amandemen UUD 1945 tahun 2002 mendesak penerapan syariat Islam secara formal dalam Konstitusi Indonesia. Hingga hari ini, kelompok-kelompok itu, dengan caranya masing-masing, terus menyuarakan aspirasi politik Islam secara formal, baik di tingkat negara maupun peraturan-peraturan daerah. Berbeda dengan aspirasi umat Islam mainstream di negara ini, kelompok yang disebut sebagai Islam Syariat ini, banyak mengagendakan terwujudnya sistem Islam di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Haedar Nashir dalam *Disertasinya* yang diterbitkan dengan judul *Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*.

Di sisi lain, kelompok politik Islam substantif, cenderung menyerukan pemahaman dan aspirasi politik Islam yang lebih

³⁴ A. Fuad Fanani & Muhd Abdullah Darraz, —Membaca Ulang Ekspresi Politik Umat Islam: Sebuah Pengantar!, *Jurnal Maarif*, Vol 8 No. 2, Desember 2013.

moderat. Kelompok ini dalam banyak hal direpresentasikan oleh organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU. Pada bagian lain, kelompok ini juga diwakili oleh partai-partai yang berbasiskan organisasi Islam, tapi berdasarkan visi kebangsaan, seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hingga hari ini, organisasi Muslim terbesar di Indonesia yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU tidak menyetujui penerapan syariat Islam secara formal di level negara seperti pencantuman Piagam Jakarta. Kelompok ini juga menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang wajib dijaga oleh seluruh komponen bangsa.

Kelompok Islam substantif ini juga diwakili oleh sebagian aktivis Islam yang aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil (civil society) dan partai nasionalis. Di sini tampak bahwa ada pergeseran Muslim Indonesia terkait dengan aspirasi politiknya. Mereka berpikir bahwa aspirasi politik Islam bisa disalurkan lewat partai lain yang bervisi inklusif dan kebangsaan. Jadi aspirasi politik Islam tidak identik dengan partai Islam atau Islam Politik. Fenomena sebetulnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah dimulai di Partai Golkar semenjak era 1980-an ketika partai ini banyak merekrut para aktivis Islam sebagai pengurus dan kadernya. Jargon Cak Nur yang

menyatakan: Islam Yes, Partai Islam No!, banyak menjadi inspirasi dan legitimasi dalam fenomena ini.

Simbol-simbol agama juga akhirnya melekat dengan partai ini, meski bukan partai Islam. Bagaimana sentiment agama, simbol, aktifitas dan institusi agama menjadi bagian atau simpul politik Golkar. Pendirian satkar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Taklim Al-Hidayah. Lembaga-lembaga keagamaan yang menjadi aspirasi dan juga wadah mobilisasi politik Golkar. Belum lagi juru kampanye yang direkrut dari kalangan tokoh-tokoh agama. Metode ini demikian signifikan dalam meraih suara pemilih umat Islam. Dan Golkar mendapat tempat di hati umat Islam. Kondisi yang berbeda dengan garis olitik umat Islam pada era sebelumnya.³⁵

Pasca reformasi, fenomena ini semakin berkembang karena banyak pimpinan inti partai-partai nasionalis yang berasal dari kaum santri. Bahkan, PDI Perjuangan dan Demokrat juga membuat sayap organisasi Islam. Kita bisa menjumpai eksistensi Baitul Muslimin di PDIP dan Majelis Dzikir Nurussalam di Partai Demokrat. Bahkan, Partai Gerindra pun melakukan hal yang sama. Dari situ tampak bahwa suara dan simbol Islam pun saat ini banyak dipakai oleh partai-partai

³⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi UmmatIslam 1965-1987 Dalam Persepektif Sosiologis* (Jakarta: Rajawali, 1989).

nasionalis.³⁶ Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan simbol-simbol agama masih dipandang penting karena emosi keagamaan kerap kali lebih kuat di banding dengan ikatan lainnya.

³⁶ A. Fuad Fanani & Muhd Abdullah Darraz, —Membaca Ulang Ekspresi Politik Umat Islam: Sebuah Pengantarl, *Jurnal Maarif*, Vol 8 No. 2, Desember 2013.

BAB III

KONDISI OBYEKTIF BANTEN DAN MASYARAKATNYA

A. Sekilas tentang Wilayah Provinsi Banten

Banten merupakan Provinsi di ujung Barat pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda, oleh karenanya ia menjadi pintu gerbang masuk pulau Jawa dari pulau Sumatera. Sebagai daerah pintu gerbang, Banten memiliki posisi strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan juga pertahanan. Terlebih posisinya yang juga berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Jakarta yang berjarak kurang lebih sekitar 90 km. Banten juga menjadi daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menjadi *hiterland* bagi Provinsi DKI Jakarta.¹

Berdasarkan luas wilayah, Provinsi Banten memiliki luas wilayah, 9.662.92 km², sekitar 0,51 % dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan letak wilayahnya Provinsi Banten berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat di Sebelah Timur, Laut Jawa di sebelah

¹ BPS Propinsi Banten, Banten dalam Angka, 2013, 6.

Utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, dan Selat Sunda di sebelah Barat.

Berdasarkan iklim wilayahnya, Provinsi Banten dapat dibagi dua yaitu Banten Selatan merupakan daerah subur dikenal sebagai daerah pertanian dan perkebunan yang juga berdampak pada udaranya yang masih sejuk. Sementara Banten Utara dan Barat yang berdekatan dengan laut sebagai daerah yang kurang subur dan juga udaranya yang panas, daerah sebelah utara ini selain dikenal sebagai daerah nelayan juga daerah pesawahan dan juga daerah industri, demikian juga daerah sebelah Barat di samping daerah nelayan, pelabuhan juga sekarang berubah menjadi kawasan industri.

Provinsi ini sebelumnya termasuk wilayah Keresidenan Banten Provinsi Jawa Barat. Terhitung sejak tahun 2000, Banten menjadi Provinsi berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2000. Provinsi Banten sebelumnya terdiri dari empat Kabupaten yang kemudian mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 8 wilayah Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Kedua Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Serang. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kedua Kota ini juga merupakan hasil

pemekaran dari Kabupaten Tangerang, ² Dengan jumlah kecamatan 155 Kecamatan, 1.238 Desa dan 313 Kelurahan.

Banten tidak hanya mengalami perkembangan wilayah dan peruntukannya, namun juga pertumbuhan penduduknya. Dari tahun ke tahun penduduk Banten mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 penduduk Banten tercatat 11.704.887 dengan rincian, 5.971.296 Laki-laki dan 5.733.581 Perempuan, dengan demikian jumlah penduduk Banten saat ini lebih banyak laki-laki. ³ Sementara itu berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 penduduk Banten berjumlah, 10.632.166 dengan perincian laki-laki 5.439.148 dan perempuan 5.193.018, dengan demikian penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Kondisi tersebut setidaknya berbeda jauh dengan beberapa dekade ke belakang sebelum Banten menjadi Provinsi. Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Banten dari Beberapa Dekade

Kabupaten/ Kota	1980	1990	2000	2010	2014
Kab. Pandegelang	694.754	858.435	1.011.843	1.149.610	1.188.405
Kab. Lebak	682.868	873.646	1.030.245	1.204.095	1.259.305
Kab. Tangerang	1.131.199	1.843.755	1.958.215	2.834.376	3.264.776
Kab. Serang	968.358	1.244.755	1.216.972	1.402.818	1.463.094
Kota Tangerang	397.824	921.848	1.326.117	1.798.601	1.999.894

² BPS Provinsi Banten, Banten Dalam Angka, Tahun 2013.

³ BPS Provinsi Banten, Banten Dalam Angka, Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	1980	1990	2000	2010	2014
Kota Cilegon	140.828	226.083	294.995	374.559	405.303
Kota Serang	-	-	436.122	577.785	631.101
Kota Tang-Sel	-	-	823.768	1.290.322	1.492.000
JUMLAH	4.015.837	5.968.522	8.098.277	10.632.166	11.704.877

Namun demikian sebaran penduduk Provinsi Banten nampak tidak merata antara wilayah satu dengan lainnya. Mereka umumnya memilih tinggal di daerah yang memiliki potensial secara ekonomi, dengan fasilitas umum yang lengkap dan fasilitas sosial yang banyak dan mudah ditemui. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang memiliki penduduk terbanyak di Banten, yaitu 3.264.776 jiwa sementara Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Propinsi Banten hanya memiliki penduduk berjumlah 631.101 jiwa.

Sementara tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Tangerang yaitu dengan kepadatan 12,992 jiwa perkilometer persegi, sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Lebak, di mana antara luas wilayah dengan jumlah penduduk terpaut jauh, yaitu 368 jiwa perkilometer persegi. Dengan kondisi wilayah yang luas sementara tingkat kepadatan penduduknya terbilang rendah. Wilayah Lebak dikenal sebagai wilayah pertanian dan perkebunan. Saat ini pembangunan di wilayah Banten Selatan juga mengalami perkembangan, baik pembangunan infrastruktur

maupun pembangunan pengembangan ekonomi, pariwisata dan juga industri. Beberapa titik wilayahnya sebagai kawasan industri, seperti Bayah yang juga dikenal dengan pariwisata pantainya yang Indah seperti Sawarna. Demikian juga sebagai kawasan industri semen yang cukup besar yang baru-baru ini diresmikan.

Pembangunan fisik wilayah Banten Selatan yang nota benenya memiliki wilayah yang luas, namun masih jauh tertinggal dengan wilayah lainnya, khususnya wilayah-wilayah yang dikenal sebagai wilayah industri maupun perdagangan seperti Kabupaten dan Kota Tangerang dan juga Tangsel, maupun Kota Cilegon dan Kabupaten serta Kota Serang. Oleh karenanya tidak heran kalau masih banyak desa yang berada di Kabupaten Lebak dan Pandegelang yang termasuk kategori desa tertinggal.

Pesatnya pembangunan di sisi lain Selama ini pembangunan industri masih terbatas perkembangannya di daerah Tangerang yang secara khusus juga berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota dan juga menjadi penyangga bagi ibu Kota. Khususnya bagi pengembangan hunian masyarakat yang mengadu nasib di Ibu Kota Jakarta. Demikian juga sebagai daerah industri Tangerang menjadi sasaran pendatang untuk mengadu nasib, bekerja maupun melanjutkan pendidikan.

Demikian juga di Kota Cilegon, wilayah yang memiliki luas paling kecil dan penduduk paling sedikit di banding daerah lainnya, namun demikian tingkat urbanisasinya tinggi dengann banyaknya pendatang yang mencari pekerjaan di wilayah ini. Sebagai kota industri menjadi tumpuan, tujuan para pencari kerja, maupun profesi yang menunjang atau memenuhi kebutuhan masyarakat industri, seperti perdagangan, jasa, hiburan pusat perelanjaan dan laiinya.

Sementara kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang merupakan daerah industri dan perdagangan juga jasa. Mereka umumnya mencari kerja di wilayah – wilayah yang menjadi sentra industri. Sektor industri, perdagangan, rumah makan, hotel jasa, pertanian dan lainnya. Berdasarkan survey angkatan kerja tahun 2014, penduduk Banten yang berusia di atas 15 tahun berjumlah 8.467.801, dengan angkatan kerja berjumlah 5.692.006 jiwa, dari angkatan kerja yang bekerja berjumlah 5.208.123 jiwa sisanya merupakan pengangguran, berjumlah sekitar 488.883 jiwa atau sekitar 9,06 %, lebih kecil turun dari sebelumnya yang bejumlah 9,87 %., berdasarkan data Pebruari 2015, jumlah pengangguran turun menjadi, 8,58 %.

Secara geografis wilayah Banten terdiri dari daerah pantai, pegunungan, pesawahan, perkebunan, tegalan. Pada hampir wilayah Kabupaten di Banten memiliki kawasan pantai

seperti Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak dan juga Kabupaten Pandegelaang.

Sebagai wilayah yang memiliki kawasan pantai, tidak hanya berpotensi secara ekonomi dari aspek perikanan, namun juga pariwisata dan beberapa di antaranya juga pelabuhan. Daerah Cilegon tidak hanya dikenal sebagai daerah industri, namun juga pariwisata dan pelabuhan, yaitu pelabuhan Merak-Bakauheni. Tempat pariwisata yang populer di wilayah ini seperti Pulorida, Salira Indah, dll. Demikian juga di Kabupaten Serang, tidak hanya seperti pelabuhan Karangantu yang dikenal sebagai daerah pelelangan ikan, demikian juga daerah Anyer yang dikenal sebagai daerah pariwisata dengan pantainya yang indah. Sementara di daerah Pandegelang terdapat Pantai Carita, di Lebak pantai Binuangen dan Sawarna, di Kabupaten Tangerang pantai Dadap, Pulau Cangkir, pulau puteri dan lainnya. Di samping itu juga Banten memiliki kawasan pegunungan dan hutan lindung, khususnya di wilayah Banten Selatan, seperti di Kabupaten Pandegelang kawasan hutan lindung ujung kulon yang juga menjadi hunian Badak yang termasuk dalam kategori hewan langka.

B. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Banten

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu Kota Jakarta, kehidupan masyarakat Banten sangat dinamis. Kehidupan sosial budaya masyarakatnya dari masa ke masa mengalami perkembangan dan perubahan. Kehidupan masyarakat Banten saat ini tidak hanya dikenal dekat dengan tradisi namun juga gaya kehidupan moderen, budaya urban namun juga budaya global, khususnya pada kehidupan masyarakat perkotaan.

Sementara di sisi lain, kehidupan masyarakat Banten yang sangat dekat dengan tradisi dan budaya yang kuat serta dekat dengan alam dan jauh dari kehidupan masyarakat kini. Mereka adalah masyarakat Baduy yang masih tetap eksis dengan budayanya dan kehidupan masyarakatnya yang tradisional mereka hidup di kawasan pegunungan (Baduy dalam) dan Baduy luar di wilayah Kanekes Lewidamar Lebak, Banten Selatan.

Banten memiliki sejarah yang panjang, sejarahnya sama tuanya bersamaan usianya dengan penemuan Benua Asia.⁴ Sejak dahulu Banten dikenal sebagai daerah Pelabuhan Internasional yang menjadi lalu lintas perniagaan nusantara. Sebagai daerah

⁴ Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan Ulama dan Jawara* (Jakarta: LP3ES, 2004), 1.

pelabuhan maka sudah menjadi keniscayaan ia menjadi lalu alang banyak orang dari berbagai daerah dan suku bangsa. Posisinya yang strategis ini pula menjadikan Banten tidak hanya sebagai tempat transit, namun juga sebagai tempat tinggal. Tidak heran kalau di Banten banyak ditemukan pendatang baik dari pulau Jawa, Sunda, Melayu, Sulawesi, Bugis, Banjar, Ternate, Cina, Arab dan juga bangsa Eropa.⁵

Melihat sejarahnya sejak dahulu Banten dikenal sebagai daerah yang terbuka bagi kehadiran para pendatang baik yang melakukan perdagangan maupun lainnya. Kondisi demikian menjadikan kehidupan sosial masyarakat Banten bersifat heterogen, baik dari suku, bangsa maupun agama, walaupun sampai kini pemeluk Islam merupakan mayoritas. Banyak suku yang tinggal dan beranak pinak di Banten, baik dari Jawa, Sunda, Melayu, Sumatera, Lampung, Sulawesi dan lainnya. Sampai saat ini komunitas masyarakat Sulawesi, khususnya Bugis masih tetap eksis khususnya di Banten Utara atau wilayah Karangantu dan sekitarnya.

Secara sosio-kultural Banten memiliki keunikan, baik dari tradisi, budaya maupun bahasa. Kota Cilegon yang berada di ujung Barat menggunakan bahasa Jawa dengan logat dan perbendaharaan kata yang berbeda dengan Jawa pada umumnya,

⁵ Nina Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah*, 33.

lebih mendekati dengan bahasa Jawa Cirebon atau biasa dikenal dengan Jawa Serang. Demikian juga dengan wilayah Serang yang justru memiliki keduanya yaitu Jawa Serang dan Sunda. Sementara Banten Selatan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandegelang berbahasa Sunda. Berbeda dengan Kabupaten, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Sebagaimana Kabupaten Tangerang seperti Mauk, Kresek justru berbahasa Jawa seperti Bahasa Jawa Serang, sebagian lainnya berbahasa Sunda sementara lainnya khususnya Tangerang Selatan mirip Betawi demikian juga budayanya, seperti Ciputat, Pamulang, Pondok Aren atau yang disebut dengan Betawi Udik,⁶ namun sebagian lainnya seperti Serpong, Tiga Raksa dan wilayah yang berbatasan dengan Banten Selatan Kabupaten Lebak menggunakan bahasa Sunda. Oleh karenanya budaya Banten demikian beragam warnanya ada yang bernuansa Sunda, Jawa-Cirebon, maupun Betawi.

Keberadaannya sebagai bagian dari Propinsi Jawa Barat, menjadikan identitas budayanyapun seolah dalam —bayang-bayang‖ Jawa Barat, kekhasan dan eksistensi dirinya serta warna budayanya belum dikenal secara luas. Baru kemudian setelah Banten menjadi daerah yang otonom dengan menjadi propinsi

⁶ Lebih jelas lihat penelitian, H.M.A Djazimi dkk, Etnis Betawi di Banten, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN SMH Banten, 2015.

tersendiri, upaya menggali dan mengembangkan budaya lokal dan kekhasannya mulai dikembangkan. Terbentuknya Propinsi Banten bukan hanya menjadikan wilayah ini memiliki kekuasaan yang independen dan mandiri, juga kemandirian dalam pembangunan dan mengembangkan potensi wilayahnya serta budayanya mulai terangkat ke permukaan. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten, misalnya mengembangkan beberapa potensi peninggalan sejarah, potensi alam dan potensi-potensi lainnya yang tidak hanya menjadi destinasi Budaya, namun juga menjaga dan mengembangkan peninggalan leluhur.⁷

Di antaranya, Keindahan Ibu Kota Banten Lama, Surosowan sisa-sisa bangunan Istana Surosowan, Kaibon, Benteng Speelwijk dan kepurbakalaan lainnya. Benda cagar budaya dan situs yang telah diinventarisasi oleh Disbudpar Provinsi Banten sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mencatat sebanyak 151 kepurbakalaan di Provinsi Banten. Jumlah kepurbakalaan sebanyak itu bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran sebuah provinsi, hingga perlu segera ditangani secara serius dan sungguh-sungguh oleh instansi terkait dan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prpinsi Banten, —Destinasi Pariwisata di Bantenl, 2015.

Keunikan lain yang dimiliki Banten adalah keberadaan suku Baduy, dimana sebuah komunitas bisa mempertahankan nilai adat dan budayanya terjaga utuh dari pengaruh modernisasi yang mulai masuk. Tradisi Sunda Wiwitan masih dipraktikkan. Pantangan yang diajarkan terus menerus secara turun temurun menjadikan mereka hidup dalam keharmonisan dengan sesama manusia dan alam. Selain Suku Baduy, ada lagi komunitas masyarakat adat Desa Cisungsang yang terletak di kaki Gunung Halimun, yang dikelilingi oleh 4 (Empat) desa adat lainnya yaitu Desa Cicarucub, Bayah, Citorek, dan Cipta Gelar. Masyarakat Adat Cisungsang dipimpin oleh seorang Kepala Adat, yang penunjukannya melalui proses wangsit dari karuhun. Mereka telah lama mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi masyarakat setempat.⁸

Dalam bidang kesenian, yang merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal, seni tradisional Banten Banten yang memiliki genealogis (keeratan hubungan) dengan tradisi Islam Kesultanan, serta kaya dengan adat keislaman lokal disinyalir hampir mengalami kepunahan akibat daya tahan seni

⁸ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten, —Destinasi Pariwisata di Bantenl, 2015.

tradisional yang kurang kuat dalam menghadapi penetrasi budaya asing. Berdasarkan data yang ada di Provinsi Banten, ada 45 jenis Kesenian Tradisional Banten yang tersebar di 4 Kabupaten dan 3 Kota yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Di antaranya: Angklung Buhun, Beluk, Bendrong Lesung, Barongsai, Calung, Cigeulisan, Calung Renteng, Cokek, Debus, Dog-dog Lojor, Degung, Dodod, Gacle, Gambang Kromong, Genjring, Reog, Rengkong, Saman, Terebang Gede, Topeng Sempilan/Wewe, Sepak Bola Api, Tanjudor, Terebang Dekem, Ubrug, Wayang Golek, Wayang Kulit, Wayang Garing, Wayang Cepak, Yalil, Wawacan Syekh, Gemyung, Gedebus, Jaipongan, Jipeng, Kendang Penca, Kuda Kepang, Keroncong, Kecapi Suling, Lenong, Mawalan, Marhaban, Patingtung, Qasidah, Rudat, Rampak Bedug.

Dari berbagai jenis Kesenian Tradisional Banten tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa Kesenian Tradisional Banten dapat dikategorikan menjadi 4 kategori: *Pertama*, Seni Tradisional yang sangat kental diwarnai hidup dan berkembangnya agama Islam, seperti: Rampak Bedug, Terebang Gede, Qasidah, Saman, Yalil. *Kedua*, Seni Tradisional yang merupakan perkawinan dari jiwa patriotismasyarakat Banten

dengan budaya Islam, seperti: Debus, Patingtung dan Rudat. *Ketiga*, Seni Tradisional yang merupakan budaya Banten tua, yang menurut sejarah lahir bersama Islam atau sebelum datangnya agama Islam di Banten, seperti: Angklung Buhun, Dog-dog Lojor, Bendrong Lesung, Beluk dsb. *Keempat*, Seni Tradisional yang datang dari luar Banten, dengan mengalami proses akulturasi budaya seperti: Kuda Lumping, Gambang Kromong, Cokek dsb.

Keberadaan sumber daya budaya di atas menunjukkan bahwa masyarakat Banten memiliki daya pikir, imajinasi, dan kreatifitas yang tinggi, dan semua itu merupakan kekayaan dan aset daerah yang harus dibina dan dikembangkan terutama untuk menentukan identitas daerah dan perkembangan pariwisata.

Sementara itu dalam kehidupan sosial ekonomi dan sumber daya manusia di daerah ini juga mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu-ke waktu. Propinsi Banten sebelumnya dikenal sebagai daerah Maritim dengan keberadaan pelabuhan besarnya. Saat ini jga masih mempertahankan eksistensinya di bidang ini, seperti keberadaan beberapa pelabuhan besar terdapat di wilayah ini, baik pelabuhan penyeberangan orang yang terletak di Merak Cilegon yang menghubungkan dengan Bakauheni Lampung, maupun angkutan barang atau logistic, seperti Pelindo maupun

pelabuhan Bojonegara sebagai lalu lintas perdagangan Internasional.

Sejak tahun tahun 1970-an Banten mulai dikenal sebagai daerah industri, seiring dengan perkembangan pembangunan sektor industri yang juga maemasuki wilayah Banten, seperti di Cilegon dengan pembangunan PT. Krakatau Steel sebagai pabrik industri baja terbesar di Asia Tenggara.⁹ Kehadiran industri ini juga kemudian diikuti oleh berdirinya industri-industri lainnya, baik dalam bentuk industri pengolahan maupun lainnya. Termasuk jenis-jenis industri turunan lainnya maupun industri lainnya berkembang pesat di wilayah ini, seperti industri kimia yang pumunya terletak di daerah Cilegon, maupun industri tekstil dan garmen yang umumnya terletak di daerah Tangerang dan Kabupaten Serang.

Namun demikian sentra pertanian, persawahan dan perkebunan dan perikanan juga masih menjadi mata pencaharian andalan. Sementara Kabupate Lebak, Kabupaten Lebak dua wulayah yang juga ikenal sebagai penghasil pertanian, demikian juga Kabupaten Serang masih menjadi sentra pertanian.¹⁰

Secara ekonomi atau aspek mata pencaharian penduduk Banten sangat fariatif. Saat ini sektor industri menempati urutan

⁹ BPS Cilegon, Cilegon dalam Angka 2014/ 2015.

¹⁰ BPS Propinsi Banten, Banten Dalam Angka, 2015.

pertama sementara sektor pertanian menempati urutan terakhir, seiring dengan perkembangan industri di wilayah ini.

Kehadiran industri dalam satu sisi berdampak pada geliat ekonomi warganya, namun di sisi lain juga menyisihkan warga lainnya yang tidak terakomodir di bidang ini, sementara untuk tetap bertahan pada kebiasaan dan keahlian mereka di bidang pertanian maupun lainnya, sudah tidak bisa karena lahan sudah banyak yang tergusur. Akhirnya kondisi demikian juga menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomis maupun sosial dan psikologis masyarakat. Terlebih sampai saat ini angka kemiskinan di propinsi Banten masih tetap tinggi.¹¹ Pada bulan Maret 2015, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten sebanyak 5,51 persen dari jumlah penduduk seluruhnya, mengalami penurunan dari bulan September 2014 (5,90 persen) tetapi mengalami kenaikan dari bulan Maret 2014 (5,35 persen).

Tabel 2
Mata Pencaharian Penduduk Banten tahun 2014

No	Sektor Pekerjaan	Jumlah	Ket
1.	Sektor Pertanian	604.998	
2.	Sektor Industri Pengolahan	1.273.815	
3.	Sektor Perdagangan, Rumah Makan, Hotel	1.155.449	
4.	Jasa-Jasa	885.341	
5	Lainnya	935.182	

¹¹ BPS Propinsi Banten, Banten dalam Angka 2015, 97

Perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri tidak hanya merubah mata pencaharian dan kehidupan ekonomi semata. Namun juga berdampak pada kehidupan aspek-aspek lainnya. Problematika sosial tidak bisa dihindari, baik problematika kependudukan, urbanisasi, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas sampai pada kenakalan dan juga tingkat kriminalitas. Sementara itu untuk kondisi keamanan, pada tahun 2014 terdapat 5.857 perkara pidana yang dilaporkan ke kepolisian, dimana sebanyak 2.191 kasus dapat diselesaikan pada tahun yang sama.¹²

Problem sosial masyarakat industri, dalam kehidupan masyarakat urban, dengan adanya urbanisasi dan tingkat migrasi yang tinggi di wilayah Banten, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra industri seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Cilegon juga Kabupaten Serang. Secara fisik menjadikan daerah daerah ini penuh dengan tampilan kemegahan, pembangunan gedung-gedung dan pusat perbelanjaan modern, menjadi pusat keramaian, baik karena perdagangan, mall-mall, jasa dan juga sarana hiburan. Kondisi demikian juga berdampak pada selera gaya hidup masyarakat, dalam satu sisi fasilitas-fasilitas demikian menunjang kebutuhan dan kemudahan bagi masyarakat industri

¹² Lihat, BPS Provinsi Banten, Banten Dalam Angka, 2015, 98

tapi dalam sisi lain juga membangkitkan sikap materialisme dan hedonisme masyarakat baik bagi yang mampu maupun yang tidak mampu.

Sementara itu untuk membangun masyarakat tidak hanya aspek ekonomi namun juga aspek pembangunan Sumber Daya Manusia, untuk meningkatkan kualitas manusia yang siap bersaing, terlebih sebagai daerah industri dan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang tidak hanya bersaing dengan masyarakat dari daerah lain yang lebih siap dari aspek pendidikan, keterampilan dan juga keahlian, namun juga persaingan dengan bangsa-bangsa lainnya.

Pendidikan adalah hal utama yang juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini Provinsi Banten telah melakukan beberapa langkah strategis, melalui pembangunan lembaga pendidikan dan membuka kesempatan serta Wajib Belajar bagi warganya.

Pada tahun 2014, di Provinsi Banten terdapat 4.559 unit Sekolah Dasar (SD) dengan 52.336 guru 1.214.338 murid. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada tahun 2014 terdapat 1.312 unit SMP dengan 14.774 guru dan 441.544 murid. Sementara untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), di Provinsi Banten terdapat 481 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 566 unit Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK), dengan 11.875 guru dan 351.776 murid. Sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3
Tingkat dan Jumlah Sarana Pendidikan
di Provinsi Banten Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Gedung
1.	Sekolah Dasar	1.214.338	52.336	52.336
2.	SMP	441.544	14.774	14.774
3.	SMA dan SMK	351.776	11.875	1.074
	JUMLAH			

Di samping lembaga pendidikan umum, di Banten juga berdiri banyak lembaga pendidikan agama seperti Madrasah dan Pondok Pesantren. Untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah terdapat 988 unit, sedangkan tingkat MTS sekitar 925 unit Madrasah Tsanawiyah, dan 387 unit Madrasah Aliyah (MA) serta 3.267 pondok pesantren.

Sementara itu tingkat pendidikan masyarakat Banten berdasarkan jumlahnya dapat diperinci sebagai berikut. Di bawah tingkat SD atau tidak lulus SD berjumlah masih cukup tinggi yaitu sekitar 23,08 %, sementara lulusan tingkat SD 26,14 %, serta lulusan SLTP 18,68 % dan Lulusan SLTA 24,61%, sedangkan ulusan perguruan tinggi masih sangat rendah yaitu sekitar 7,59 %.¹³

¹³ BPS Propinsi Banten, Banten Dalam Angka, 2015, 115

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Banten Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Tidak lulus SD	23, 08 %	
2.	Lulusan SD	26, 14 %	
3.	Lulusan SLTP	18, 68 %	
4.	Lulusan SLTA	24, 61 %	
5.	Lulusan Perguruan Tinggi	7, 59 %	

Dengan demikian mayoritas masyarakat Banten masih berpendidikan tingkat SD yang sedikit berimbang beda dua persen dengan tingkat pendidikan SLTA, Bila diurutkan berdasarkan jumlah persentasenya adalah; Tingkat pendidikan SD, Pendidikan SLTA, Tidak Lulus SD, Pendidikan SLTP dan yang terakhir pendidikan perguruan tinggi. Peningkatan kelulusan tingkat SLTA justru lebih tinggi dari SLTP.

Dengan demikian secara umum APS Provinsi Banten tahun 2014 adalah untuk kelompok umur 7-12 tahun 99,29 persen, kelompok umur 13-15 tahun 94,87 persen, kelompok umur 16-18 tahun 66,25 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun 19,61 persen. Dengan menggunakan metode baru dalam penghitungannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten menunjukkan peningkatan dari 69,47 pada tahun 2013 menjadi 69,89 pada tahun 2014. IPM tersebut ditopang oleh

Angka Harapan Hidup sebesar 69,13 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,31 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8.19 tahun, dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 11.150.000 rupiah per tahun. Pada tahun 2014, IPM tertinggi yaitu 79,17 dicapai oleh Kota Tangerang Selatan, sementara IPM terendah yaitu 61,64 dicapai oleh Kabupaten Lebak.¹⁴

C. Kehidupan Agama dan Politik di Banten

Masyarakat Banten dikenal sebagai masyarakat yang religius, taat beragama ada juga yang mengistilahkan fanatik beragama. Dalam sejarahnya Banten dikenal sebagai salah satu pusat kerajaan Islam di pulau Jawa setelah Demak dan Cirebon. Sebagai salah satu pusat kekuasaan Islam, penetrasi Islam demikian kuat di Banten dan sekitarnya, sehingga membentuk karakter masyarakat Banten yang dikenal fanatik dan religius.

Sampai kini umat Islam di Banten merupakan mayoritas, dari jumlah penduduknya yang kini mencapai 11.704.877 pada tahun 2014. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas dengan persentase 92, 85 %, Kristen 1, 99 %, Katholik 1, 22 %, Hindu 0, 78 %, Budha, 3, 21 % dan Konghucu 0, 01 %.¹⁵ Dengan perincian sebagai berikut:

¹⁴ BPS Provinsi Banten, Banten Dalam Angka, 2015

¹⁵ BPS, Banten Dalam Angka, 2015, 132.

Tabel 5
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1.	Islam	92, 85 %	
2.	Kristen	1, 99 %	
3.	Katholik	1, 22 %	
4.	Hindu	0, 78 %	
5.	Budha	3, 21 %	
6.	Konghucu	1,01 %	
7.	Lainnya	0 %	

Sementara sarana dan prasarana atau rumah ibadah yang ada di Provins Banten memenuhi kebutuhan semua pemeluk agama yang hidup di daerah ini, di antaranya:

Tabel 6
Rumah Ibadah semua Agama yang ada di Provinsi Banten

No	Pemeluk	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Islam	Masjid	6.938
2.	Kristen	Gereja	562
3.	Katholik	Gereja Katholik	14
4.	Hindu	Pura	10
5.	Budha	Vihara	114
6.	Konghucu	Kelenteng	9

Dengan demikian, walaupun Banten dikenal identik dengan umat Islam yang fanatik, namun bukan berarti menutup diri dari perbedaan keyakinan atau agama. Terbukti semua agama yang diakui oleh negara bisa hidup berdampingan dengan rukun di daerah ini. Kehidupan agama di Provinsi ini jarang menimbulkan konflik yang disebabkan oleh keyakinan atau

agama. Toleransi antar umat beragama terjaga dengan baik dan menjalankan agamanya dengan kondusif di daerah ini.¹⁶

Kekentalan nuansa Islam dalam kehidupan masyarakat Banten tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah Banten itu sendiri. Sebagaimana diketahui Banten pernah menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Islam yang cukup kuat. Sebelum berdirinya kesultanan Banten telah mengalami proses islamisasi melalui para pedagang yang datang dan singgah di wilayah ini. Berdirinya Kesultanan Banten dengan Sultan Maulana Hasanudin sebagai Sultan Pertamanya, menjadikan Banten sebagai kesultanan yang cukup besar dengan kekuasaannya yang meliputi wilayah Banten, Jayakarta, Karawang Lampung, Bengkulu dan beberapa daerah Sumatera Selatan.¹⁷ Terlebih pasca terjadinya krisis di lingkungan Keraton Kerajaan Demak, menjadikan Banten menjadikan kerajaan yang berdiri sendiri dan melepaskan diri dari kekuasaan dan pengawasan Demak. Oleh karena ia Sebagai Sultan pertama di kesultanan ini maka Sultan Maulana Hasanuddin kemudian dikenal sebagai pendiri kesultanan ini (1552-1570).

¹⁶ Hasil penelitian Muhammad Hudaeri, Umdatul Hasanah dkk, Hubungan Antar Umat Beragama di Banten: Konflik dan Integrasi, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2011

¹⁷ Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah*, 35.

Kerajaan Islam Banten tidak hanya memiliki kejayaan ekonomi dan kekuatan politik, namun juga kekuatan agama yang memiliki hubungan langsung dengan pusat otoritas kislaman yaitu Arab Saudi, sehingga mendapat gelar —Sulthan|. Religiusitas masyarakat Banten tidak hanya nampak pada semangat menyebarkan, menjalankan dan mengamalkan ajaran agama, namun juga pada pengembangan keilmuan agama. Sebagaimana nampak pada karya-karya ulama Banten yang mendunia yaitu karya-karya Syeikh mam al-Nawawi ulama besar Haramaian yang berasal dari Banten.¹⁸

Kesultanan Banten yang bercorak Islam tidak hanya meneguhkan kekuasaan Islam yang kuat secara politik pada masanya, akan tetapi juga menguatkan dan menancapkan pengaruh Islam bagi kehidupan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Keislaman masyarakat Banten sebagaimana digambarkan oleh Snouck Hurgronje, merupakan masyarakat yang paling taat menjalankan ajaran agamanya di banding dengan masyarakat di wilayah lainnya.¹⁹ Kerajaan ini pernah mengalami masa kejayaannya pada abad ke-17, sampai akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan seiring

¹⁸ Lihat, Ayatullah Khumaeni, *Akulturası Islam dan Budaya Lokal dalam Magi Banten*, (Serang: Bantenologi, 2014).

¹⁹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung:Mizan, 1995).

dengan hegemoni Belanda yang menyebabkan terjadinya konflik internal di lingkungan keluarga raja.²⁰

Runtuhnya Kesultanan tidak lantas menghilangkan sesuatu yang diandang fundamental bagi masyarakat Banten, yaitu independensi, nasionalisme lokal dan keterikatan pada agama.²¹ Maka ketika kesultanan mulai melemah, ulama tampil ke muka menjadi pendekar dan pembela kebenaran. Beberapa peristiwa gerakan perlawanan terhadap hegemoni pemefitahan colonial Belanda, dipimpin oleh ulama terjadi di beberapa wilayah, seperti Gerakan Cikande Udik (1845), Gerakan Ciomas (1886), Geger Cilegon, (1888).

Oleh karenanya ulama bagi masyarakat Banten bukan hanya pemimpin spiritual dan rujukan moral serta keilmuan, akan tetapi juga sebagai kekuatan dan pemimpin sosial bahkan pemimpin gerakan peperangan (politik). Melalui ketokohan ulama atau kiyai ini kemudian melahirkan struktur lain dalam sejarah sosial masyarakat Banten yang disebut dengan Jawara.

Jawara pada mulanya adalah murid kiyai, kiyai memiliki dua murid ada yang menekuni bidang keilmuan Islam yang kemudian dikader untuk menjadi ulama, namun ada juga yang

²⁰ Taufik Abdullah, Pengantar, dalam Nina Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah*, xxvii.

²¹ Taufik Abdullah, Pengantar, dalam Nina Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah*, xxvii.

menekuni bidang ilmu bela diri atau kanuragan. Berdasar pada kekuatan fisik dan ketekunannya pada ilmu beladiri atau kanuragan ini yang kemudian melahirkan Jawara.²²

Ulama dan Jawara inilah yang kemudian menjadi tokoh sentral bagi masyarakat Banten sampai saat ini, terlebih dalam hubungannya dengan politik di Banten tidak dapat melepaskan dari peran dan pengaruh keduanya. Oleh karenanya tidak heran kalau kemudian kehidupan politik dan agama di Banten tidak dapat dipisahkan, bahkan dinamika dan kehidupan politik di Banten tidak sepi dari penggunaan simbol-simbol agama.

Sejak Banten berdiri menjadi Provinsi sendiri pada tahun 2000 yang terpisah dari Jawa Barat, babak baru kehidupan politik di Banten di mulai dengan mencari pemimpin di tanah Jawara. Sebutan ini nampaknya menguatkan sinyal bahwa secara politik kekuatan kelompok inilah yang kemudian mendominasi, di banding dengan kalangan ulama.²³ Hal itu terbukti pada kepemimpinan di Propinsi Banten yang sejak berdiri sampai saat ini dikuasai oleh jaringan dan keluarga TB. Hasan Sohib yang menjadi simbol punggawa Jawara di Banten.

²² H.M.A. Tihami, *Kiyai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang Banten*, —Tesisl Universitas Indonesia, 1992.

²³ Lihat, Abdul Hamid, *Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru Studi Kiai dan Jawara di Banten*. [ejournal undip.ac.id/index.php/politik/article/download/4887/4433](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politik/article/download/4887/4433) (diakses, 1 agustus 2016).

Terpilihnya Ratu Atut Chosiyah yang nota-benanya adalah puteri TB. Hasan Sohib menguatkan pandangan tersebut.

Tidak hanya Atut, beberapa keluarga TB. Hasan Sohib tampil dan menang dalam pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah di Propinsi Banten. Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten, TB. Khairul Jaman menjadi Walikota Serang yang juga anak Tb. Hasan Sohib dari isteri lainnya, demikian juga Ratu Tatu Hasanah yang juga adik kandung dari Ratu Atut Khosiyah terpilih sebagai wakil bupati Kabupaten Serang dan saat ini terpilih kembali sebagai Bupati Kabupaten Serang. Demikian juga Airin Rahmi Diani yang notabenenya mantu Tb. Hasan Sohib isteri dari anaknya TB. Khairul Wardana, demikian juga salah satu isteri Khasan Shohib sendiri yang kemudian menjadi wakil bupati Pandegelang. Sementara mantu Atut Khosiyah sendiri Tanto menjadi Wakil Bupati Kabupaten Pandegelang mendapiri Bupati Irna Narulita. Saat ini anak dari Atut Khosiyah sendiri yaitu Andika Hazrumi juga tampil sebagai calon wakil Gubernur berpasangan dengan Wahidin Halim untuk Pilgub Banten 2017. Hampir semua wilayah telah dikuasai oleh klan Jawara dari satu keluarga, kecuali Lebak, Cilegon, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Bahkan untuk kepemimpinan yang sifatnya —keulamaanl saja Jawara masuk di dalamnya bahkan tampil sebagai ketuanya,

sebagaimana terlihat bagaimana TB. Hasan Sohib pernah menjadi ketua Satkar Ulama Golkar Propins Banten.²⁴

Keterpilihan klan jawara juga tidak terlepas dari andil beberapa tokoh agama, ulama, kiyai, ustadh, ustadhah. Mereka keluarga jawara ini umumnya juga memiliki hubungan yang baik dengan kalangan ulama dan tokoh-tokoh agama lokal, pemimpin pondok pesantren, majeis taklim dan pemimpin organisasi-organisasi besar baik dalm bidang keagamaan dan kemasyarakatan, maupun organisasi sosial ataupun profesi termasuk juga organisasi kepemudaan.²⁵ Klan jawara ini rajin sowan dan bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh agama, ulama di Banten.

Klan Jawara tidak hanya menguasai kehidupan eonomi melalui bisnis dan usahanya di berbagai bidang, juga politik dan saat ini juga merambah pada bidang agama, melalui pendirian masjid dan majelis taklim. Entah karena menunjukkan pehatiannya yang tinggi terhadap kehdupan agama, atau

²⁴ Lihat, Abdul Hamid, Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru Studi Kiai dan Jawara di Banten. *ejournal undip.ac.id/index.php/politik/article/download/4887/4433* (diakses, 1 agustus 2016).

²⁵ Kekuatan jaringan ini dapat dilacak dari posisi keluarga ini dalam berapa organisasi yang memiliki kedudukan signifikan baik secara politik sebagai pengurus Partai, seperti sebagai ketua DPD Golkar Banten, demikian juga dalam organisasi sosial maupun ekonomi, seperti PMI, Karang Taruna, KNPI, KADIN, P2TP2, dan lainnya, termasuk juga jaringan keagamaan melalui pendirian Majelis Taklim Al-Chosiyah yang memiliki jaringan di semua Kabupaten dan Kota di Banten.

membuat kekuatan jaringan memalalui simul keagamaan, yang jelas majelis taklim Al-Chosiyah membuat cabang di setiap kota kabupaten bahkan kecamatan. Jaringan majelis taklim ini menjai salah satu *patron client* baik penguasa maupun partai politik.

Sebagai negara yang memiliki hubungan simbiosis dengan agama, di mana agama dan politik berjalan beringan dan saling menguatkan, Maka ketika politik bersinergi dengan agama, atau penggunaan wadah, tokoh dan bahasa keagamaan untuk tujuan-tujuan politik dianggap sebagai sebuah keniscayan atau kewajaran, selama hal itu dilakukan secara proposional. Namun demikian penggunaan simbol-simbol agama dalam ranah politik menimbulkan beragam tafsir, dari tafsir agama, tafsir politik bahkan tafsir simbol itu sendiri.

Sebagai daerah yang lama berada pada kekuasaan Islam, dan keagamaan penduduknya yang sangat kuat lagi fanatik, penggunaan simbol-simbol menjadi salah satu pintu masuk terbentuknya daya tarik dan simpatik publik. Simbol agama yang digunakan secara personal oleh tokoh publik di ruang publik seperti pakaian, bahasa, istilah maupun hal-hal lain terkait dengan agama. Atau simbol yang digunakan pada ruang-ruang publik, dapat dimaknai dari berbagai erspektif, Hal ini akan dikupas lebih jauh di bab berikutnya.

BAB IV
BENTUK DAN PEMAKNAAN
SIMBOL AGAMA DI RUANG PUBLIK

A. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Istilah atau Deskripsi Verbal

Kata-kata atau istilah adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki makna. Pemaknaan ada yang bersifat denotatif dan ada juga yang bersifat konotatif.¹ Pemaknaan denotatif biasanya dipahami sebagaimana dipahami pada umumnya berdasarkan kamus atau definisi umum, sehingga pemaknaan ini seragam atau umumnya memiliki kesamaan. Sedangkan pemaknaan konotatif biasanya didasarkan pada siapa atau subyek yang memahami terhadap sesuatu benda, istilah, atau kata yang bisa jadi berbeda antara satu dan lainnya terhadap kata, benda, atau hal yang sama. Dalam pemaknaan denotatif hampir tidak ditemukan perdebatan dan pada umumnya sepakat, sementara dalam pemaknaan konotatif sangat dinamis tergantung siapa yang memaknai dan dari sudut pandang yang beragam.

Demikian juga dalam istilah-istilah atau bahasa keagamaan ada yang bersifat dan berlaku umum, namun juga

¹ Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988).

ada istilah yang berlaku khusus ataupun penafsiran yang beragam sehingga menimbulkan pandangan dan mazhab yang berbeda-beda. Namun demikian ada juga istilah-istiah yang dipandang memiliki definisi yang dipahami seragam atau relatif sama. Seperti kata *iman, taqwa, ikhlas, syukur, akhlak karimah, berkah* merupakan istilah-istilah keagamaan yang umum digunakan dalam bahasa sehari-hari umat beragama khususnya Islam yang menunjukkan tuntunan hidup, keyakinan, sikap dan perilaku yang seharusnya sebagai muslim.

Kata iman dan taqwa misalnya dalam pengertian secara umum berarti seseorang dikatakan beriman ketika meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan tiada Tuhan selain Dia melalui keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan Taqwa berarti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kata dan istilah demikian tidak hanya menjadi himbuan keagamaan semata yang dilakukan dalam ruang-ruang agama, namun telah menjadi istilah publik dan menghiasi ruang-ruang publik di Banten.

Seiring dengan terjadinya era otonomisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, dan disempurnakan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Keberadaan aturan yang

memberikan keleluasaan bagi daerah tidak hanya dalam mengatur tata kelola rumah tangganya, namun juga keleluasaan dalam segenap potensi dan pengembangan daerahhnya. Di sisi lain juga aturan tersebut juga membuka peluang untuk memenuhi dan mengakomodir kebutuhan lokal daerah terkait dengan banyak hal. Salah satunya adalah identitas, simbol dan kekhasan yang menggambarkan karakter dan identitas daerah dan masyarakatnya.²

Kata iman dan taqwa misalnya digunakan menjadi simbol daerah Banten sebagaimana tertera dalam lambang daerahnya. Simbol tersebut sebagaimana penjelasannya dimaksudkan sebagai spirit juga sebagai landasan pembangunan menuju Banten yang mandiri, maju dan sejahtera (Darussalam).³ Pembangunan yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh pemeluknya sebagaimana tercantum dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara Banten dalam hal ini dikenal sebagai daerah basis muslim mayoritas yang dikenal fanatik keagamaannya

² Keberadaan perundang-undangan ini juga membuka peluas lahirnya kebijakan, tuntutan daerah dalam ymemberikan keleluasaan tampilnya kekhasan, lokal wisdom dan sejenisnya.

³ BPS Propinsi Banten, dalam Banten dalam Angka, 2011

sangat kuat.⁴ Namun demikian juga menghargai dan memberikan kebebasan terhadap masyarakat yang beragama lain untuk menjalankan keykinaan dan agamanya masing-masing yang juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut KH. Syafei, salah seorang tokoh agama I serang, menyatakan, bila masyarakatnya menjalankan kesadaran agama dengan baik, taat menjalankan agama dan saling menghormati satu sama lain maka akan menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Dengan kondisi keamanan, kenyamanan, ketentraman maka program pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera tidak hanya dari aspek lahiriyah namun juga kesejahteraan batiniah.⁵

Dengan demikian simbol maupun slogan di atas bukan hanya dimaksudkan sebagai identitas semata berdasarkan nilai-nilai religiusitas masyarakatnya, akan tetapi sebagai pedoman, acuan, tuntunan ketika Sementara itu dalam pandangan beberapa komunikan (publik, masyarakat) memandang semboyan iman dan taqwa sebagai penuntun perilaku dan juga visi

⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995).

⁵ Demikian pandangan tokoh agama yang mendukung penggunaan simbol agama sebagai motifasi, simbol ini bukan hanya sebagai identitas semata, namun juga sebagai acuan dan tuntunan hidup masyarakat Banten yang religious. Wawan cara dengan KH. Syafei, Serang 13 Agustus 2016.

pembangunan yang tidak hanya bertujuan membangun aspek fisik namun juga aspek psikis, yaitu pembangunan jasmani dan rohani juga untuk mencapai kebahagiaan keduanya.

Penggunaan selogan itu juga berarti sebagai petunjuk sekaligus pagar agar jangan sampai pembangunan dan kehidupan masyarakat di Banten melenceng dan keluar dari aturan main, baik aturan Negara dalam bentuk Undang-Undang, maupun aturan lokal dalam bentuk kearifan lokal, maupun aturan Tuhan yang diimplementasikan dalam pemahaman dan penafsiran di kedua aturan di atas, baik dalam bentuk konkrit peraturan yang berbasis syari'ah maupun nilai-nilai syariah yang menjadi bingkai agar aturan negara tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu aturan Allah Swt.⁶

Akan tetapi karena bangsa Indonesia bukan negara Islam seringkali menjadi alasan penolakan penggunaan aturan-aturan agama dalam peraturan per-Undang-Undangan yang tidak mudah karena akan mendapat penolakan dari komponen bangsa lainnya. Seperti yang pernah terjadi terkait RUU Pornografi dan Pornaksi, Undang-Undang tentang Alkohol dan minuman keras dan juga lainnya. Termasuk juga di daerah bahkan yang nota-

⁶ Demikian penuturan H. Mahmud, salah seorang agama di Kota Serang (Wawancara, Serang, 10 Agustus, 2016). Pandangan tersebut juga diamini oleh H. Rasna salah seorang tokoh agama di Tangerang (Wawancara, 10 Agustus, 2016).

benenya mayoritas seperti Banten tidak terlepas dari penolakan dan juga dukungan, pro an kontra.

Demikian juga selogan Bertaqwa, kata Serang bertaqwa sebelumnya demikian populer dan juga mewarnai berkibar spanduk di mana-mana di ruang publik sepanjang jalan, walaupun kata ini tidak muncul dalam logo daerah, yang muncul adalah selogan Kabupaten Serang — Sepi ing pamrih rame ing gawell, namun demikian selogan-selogan Serang bertaqwa ini bertebaran di sepanjang jalan kota serang dan juga kerap akrab diucapkan oleh tokoh-tokoh publik. Serang bertaqwa yang berarti kepanjangan dari (Bersih, tertib, aman, Quality dan bertaqwa).

Demikian juga Pandegelang BERKAH sebagaimana tertera dalam Logo daerah yang berarti (bersih, elok, ramah, kuat, aman, hidup). Kabupaten yang juga dikenal sebagai kota santri, dengan kehidupan dan jumlah pesantren, khususnya pesantren tradisional (salafi) yang masih tetap eksis di Kabupaten ini.

Kota Serang, setelah berdiri sendiri menjadi Kota yang mandiri dan terpisang dengan Kabupaten induknya Kabupaten Serang, menggunakan selogan baru yang dikenal dengan Kota Serang *Madani* sebagaimana tertera dalam logo daerahnya juga, *Madani* mengandung filosofi bentuk kemandirian suatu daerah,

madai memberikan arti yang luas sebagai pengayoman *civil society* yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat serta budaya.⁷

Kota Tangerang juga memiliki selogan keagamaan dengan semboyannya Tangerang *Berakhlakul Karimah*. Penggunaan kata-kata dan istilah keagamaan menjadi pemandangan sekaligus juga pendengaran dan ucapan yang terpatri dalam ruang-ruang publik, sebagai acuan, arah dan bingkai kehidupan masyarakat. Istilah-istilah tersebut dijadikan sebagai simbol dan motto bagi keberlangsungan dan pengembangan Kota yang tidak semata-mata berorientasi pada kehidupan fisik semata, namun juga pembangunan mental, jiwa dan perilaku masyarakatnya.

Istilah seperti *Akhlakul Karimah* yang menjadi motto Kota Tangerang. Kata Akhlakul Karimah dalam terminologi agama artinya Akhlak yang mulia yaitu berbudi pekerti yang baik, bersikap, berakhlak yang dicerminkan dalam perilaku sebagai bentuk perwujudan keimana, ketaqwaan dan keatuhan kepada perintah Allah Swt, baik dalam hubungan dengan khaliq maupun dalam hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan⁸.

⁷ Badan Pusat Statistik, Kota Serang, Serang dalam Angka 2014

⁸ Barmawi Umary, *Materi Akhlak* (Solo: CV Rhamdhani, 1984).

Istilah *Akhlakul Karimah* tidak hanya menjadi visi pembangunan di Kota Tangerang akan tetapi juga menjadi ikon Kota Tangerang yang dipasang di tempat-tempat umum dan startegis sehingga menjadi pemandangan yang akrab di mata masyarakat. Istilah Akhlakul Karimah digagas oleh pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Wahidin Halim yang menjabat ssebagai pemimpin di wilayah ini selama dua periode. Baginya umat Islam merupakan mayoritas yang sudah saatnya menjadi pelaku dan juga contoh berdasarkan nilai-nilaiajaran Islam yang dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akhlak merupakan elemen utama dan menjadi pondasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan dan menjadi khalifah di muka bumi. Pembangunan Akhlak sebagaimana juga ditanamkan oleh Rasulullah dalam pesan utama dakwahnya. Berdasarkan visi inilah pembangunan yang berdasar pada Akhlakul Karimah ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk turunan peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah, serta simbolisasi lainnya yang menerjemahkan Akhlakul Karimah dalam tataran praktis dan kebijakan.⁹

⁹ Khairunnisa, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi Simbol-Simbol Islam pada Ruang Publik di Kota Tengerang*,(Ciputat: YPM, 2012).

Publik memandang positif keberadaan simbol itu yang tak kalah mentereng dengan iklan-iklan dan billboard yang menghiasi pintu gerbang dan jalan protokol. Bagi publik yang lebih penting akhlak tercermin tercermin dari keteladanan dan kemuliaan Akhlak pemimpinnya dan juga masyarakatnya. Cerminan sikap pemimpin yang berakhlak misalnya tidak korupsi, menjalankan aturan dan hukum dengan tegas dan konsekwen, melayani masyarakat dengan baik.¹⁰

B. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Penampilan atau Artifaktual

Dalam komunikasi interpersonal banyak faktor yang melahirkan kesan bagi komunikator maupun komunikan. Kesan yang dibangun melalui proses dan simbol-simbol yang nampak, seperti: Deskripsi Verbal, yaitu ucapan atau kata atau istilah yang menunjukkan dan membangun suatu kesan terhadap lawan bicara baik kesan positif atau kesan negative, contohnya istilah-istilah seperti ramah, cerdas, humble, sabar, lembut dan lainnya yang dilekatkan kepada komunikator atau lawan bicara. Sedangkan paralinguistic, artinya aksentuasi bahasa dan gaya bicara yang mengesankan dari kelompok, suku atau daerah tertentu berdasarkan gaya bicara atau bahasa yang digunakan.

¹⁰ Demikian penuturan salah seorang responden, (Wawancara dengan H. Yayan, Cikokol, 15 Agustus 2016).

Petunjuk kinesik, adalah petunjuk gerak tubuh atau gesture atau body language yang kemudian membangun kesan tersendiri terhadap komunikator, seperti kepala tengadah, wajah menunduk, mengigit jari dan lainnya. Proksemik, adalah jarak dalam komunikasi yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan, sehingga membangun kesan akrab, atau berjarak, arogan atau menjaga imaj atau procedural protokoler dan sejenisnya yang dapat diterjemahkan dari bagaimana jarak dalam proses komunikasi. Petunjuk wajah, adalah raut muka dalam proses komunikasi yang menunjukkan keramahan atau kesombongan atau keacuhan atau sikap masa bodo, setuju atau menolak dan lainnya. Artifaktual, adalah gaya penampilan atau aksesoris yang menyertai komunikator ataupun komunikan sehingga membangun kesan seperti kemewahan, kekayaan, kemiskinan, kebersihan, resik, jorok, kumel, brandid, sederhana, ataupun cuek dan lain sebagainya. ¹¹

Dalam hubungannya dengan Komunikasi Politik elemen-elemen di atas juga kerap kali menjadi perhatian tersendiri yang juga kerap dimaknai secara politik. Baik dari aspek deskripsi verbal, dan lainnya, seperti alim, shaleh, santri yang membangun kesan tersendiri bagi imaj seorang tokoh. Simbol

¹¹ Lihat, Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 2002).

santri alim, shaleh bagi masyarakat yang masih kuat mengutamakan simbol dan instrument tersebut, dapat menjadi daya tarik dan daya jual mendapatkan simpatik publik. Terlebih ditambah dngan kemampuannya menggunakan dali-dalil agama secara fasih, menjadi kelebihan tersendiri, khussunya di Banten yang memiliki kategori Islam santri dan fanatik.

Demikian juga aspek penampilan fisik dan ruang dengan menggunakan simbol-simbol agama, Seperti Penampilan dengan menggunakan aksesoris dan simbul-simbul agama seperi busana muslim, hijab, jilbab, baju koko, sorban, peci maupun ucapan yang menunjukkan sikap —keagamaan^{ll}, ketaatan, keshalihan dan sejenisnya yang kerap kali digunakan oleh tokoh-tokoh politik maupun kekuasaan, bisa bermakna sebagai identitas maupun politis. Untuk membedakan makna yang bermakna politis dan identitas maupun dakwah atau syiar memang tidak mudah. Peci, sorban, gamis, hijab merupakan simbol-simpol penampilan ang bermakna religious, walaupun model-model tersebut juga erat hubungannya dengan budaya (Arab) namun demikian tidak bisa dilepaskan dari corak ke-islaman. Namun sebaliknya walaupun secara substantive serang komunikato menggunakan akaian yang menutup aurat tapi dengan gaya akaian levis mislanya yang sangatidentik Barat, maka jauh dari penilaian sebagai Islami.

Bagi masyarakat Banten Hijab sebagai mana juga sudah menjadi trend nasional yang tidak hanya menandakan ketaatan beragama, maupun bermakana ideologis maupun identitas juga sudah menjadi trend gaya hidup. Sehingga hal itu sudah bukan menjadi sesuatu yang signifikan sebagai tolak ukur dengan kaca mata tunggal. Namun demikian bagi masyarakat Banten penampilan demikian menjadi pintu masuk utama untuk bisa diterima sebagai bagian yang sama dengan identitas yang digunakan masyarakat. Oleh karenanya Megawati maupun isteri presiden yang tidak berhijab ketika memasuki wilayah ini dan tampil di hadapan publik kerap kali menggunakan hijab, entah itu sebagai sebuah penghormatan atau sebagai bentuk penyesuaian diri.

Demikian juga dengan penggunaan tempat-tempat yang mengandung unsur simbol keagamaan, seperti masjid, pesantren madrasah, majelis taklim menjadi tempat yang laris dikunjungi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, khususnya menjelang pileg, pilgub maupun pilkada. Bukan hanya karena lembaga-lembaga keagamaan memiliki jamaah yang cukup potensial suaranya, namun juga dapat membangun kesan sebagai orang yang menghormati elit lokal (ulama) maupun juga simbol perhatian terhadap kehidupan dan kemajuan agama.

Dalam perspektif komunikasi dalam teori *Dramaturgis* yang di gagas oleh George Herbert Mead, mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sosial itu dibagi menjadi dua wilayah, ada wilayah depan atau (Front Region) dan wilayah belakang (Back Region). dikenal apa yang disebut panggung depan dan panggung belakang. Wilayah depan atau istilah lainnya panggung depan (Front Stage) yang biasanya dilihat atau ditonton khlayak, sedangkan wilayah belakang atau istilah lainnya dibelakang panggung (Front Stage), biasanya ruang yang tidak terakses oleh publik atau hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya, seperti ruang pribadi, ruang rias, ruang latihan dan lainnya yang biasanya menjadi tahapan sebelum menuju panggung depan.¹²

Simbol-simbol keagamaan yang terkait dengan penampilan maupun aksesoris dan juga tempat-tempat yang dikunjungi memiliki makna tersirat apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan politik, hal itu bisa dimaknai sebagai sebagai pencitraan yang mengesankan kesalehan beragama, Islami, santun, santri, alim dan lain sebagainya. Demikian kesan publik terhadap penampilan yang ditujukan oleh komunikator dihadapan publik di Banten, di

¹² Lihat, Deddy Mulayan, *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropog Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 87.

bandingkan dengan penampilan sebaliknya mereka lebih senang dengan penampilan dengan simbol agama, terlepas dari itu lahir dari hati atau biar menatik simpatik.¹³

Citra demikian dapat dimaknai sebagai bentuk untuk menarik simpatik pemilih yang masih kuat pertimbangannya berdasarkan emosi keagamaan berdasarkan apa yang nampak di panggung depan. Walaupun seringkali penampilan seseorang di panggung depan dan di balik panggung atau panggung belakang kerap kali berbeda. Oleh karenanya penampilan panggung depan sebenarnya memiliki potensi manipulatif, tidak jujur atau polesan (*casing*). Mengetahui panggung belakang sosok tokoh publik penting adanya, seperti menelisik rekam jejak, aktifitas harian atau mencari sumber-sumber valid yang bisa dipercaya yang bisa mengintainya dipanggung belakang sebagai bentuk kroscek dan untuk membuktikan dengan yang sebenarnya.

Demikian juga mengunjungi tempat-tempat ibadah lembaga pendidikan keagamaan dan juga tokoh-tokoh agama, khususnya yang memiliki pengaruh besar, maka secara otomatis juga berdampak pada pembangunan persepsi publik sebagai bentuk dukungan yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Sehingga tidak jarang pada momen menjelang pilkada semua

¹³ Wawancara dengan komunitas anak muda Banten, di antaranya, Sofyan, Faisal dan Irma ketiganya adalah Mahasiswa di Banten (Serang, 16 Agustus, 2016).

turun gunung dan terutamanya sowan ke tokoh-tokoh agama, baik dalam bentuk silaturahmi biasa, meminta doa restu maupun memberikan bantuan.¹⁴

Walaupun penggunaan simbol-simbol agama bukan satu-satunya instrument yang menjadi alasan pemilih, bahkan di beberapa wilayah penggunaan simbol-simbol agama tidak memiliki relevansi dan tidak signifikan dalam mendulang suara pemilih, seperti kasus pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, antara calon petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Romli dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang notabene dari etnis minoritas China dan non muslim. Dalam konteks masyarakat Jakarta sebagai masyarakat urban dan pemilih rasional, tidak lagi menjadikan emosi keagamaan sebagai penentu pilihan.

Kondisi demikian bisa jadi berbeda dengan wilayah lainnya, khususnya di daerah-daerah di mana emosi keagamaan demikian kuat, khususnya di Banten. Itulah sebabnya di Banten, emosi keagamaan menjadi utama, sehingga siapapun yang akan

¹⁴ Seperti yang terjadi saat ini menjelang Pilkada serentak yang digelar pada 2017 termasuk PILGUB Propinsi Banten. Terlebih Banten yang dikenal sebagai daerah religious dan fanatic dengan sentiment keagamaan, hampir semua calon menempuh cara-cara penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam bentuk penampilan atau artifaktual, baik yang berbasis partai Dakwah, religious nasionalis atau bahkan yang nasionalis murni.

bertarung atau merambah wilayah Kiyai dan Jawara ini tidak dapat lepas dari penggunaan simbol-simbol agama. Bahkan munculnya salah satu ketua umum Partai Politik Nasionalis PDI-P, Ribka Ciptaning yang diduga oleh beberapa kalangan memiliki trah dengan keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat mendapat penolakan yang meramaikan berita media lokal. Termasuk berita terbaru adalah ditetapkannya Kapolda Banten yang baru yang konon non Muslim sempat tidak mendapat dukungan dari komponen masyarakat atau organisasi keagamaan. Sikap kelompok ini berbeda terhadap Kapolda sebelumnya yang demikian akrab dan juga dikenal alim, seperti Kapolda Boy Rafli. Menurut pandangan masyarakat, Banten adalah wilayah eks Kesultanan Islam seharusnya Pemerintah Pusat peka terhadap kondisi tersebut, sebab Kapolda tugasnya bukan hanya pada pengamanan namun juga agar bisa bersinergi dalam berbagai program khususnya terkait dengan aktifitas dan kehidupan keagamaan masyarakat yang nota-benanya mayoritas muslim, hal itu menunjukkan beta emosi dan sensitifitas keagamaan msyarakat Banten demikian tinggi.¹⁵

¹⁵ Beberapa tokoh agama di Banten berharap pimpinan wilayah atau pimpinan publik yang ditempatkan di Banten hendaknya memiliki keyakinan yang sama agar bisa menyatu dengan masyarakat. (harapan tersebut di antaranya disampaikan oleh penguus MUI Tangerang H. Jasmaryadi, demikian juga tokoh lainnya seperti tubagus Saptani, Tubagus Imamuddin, 12 Oktober 2016).

C. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Kebijakan

Seiring dengan terjadinya era otonomisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, dan disempurnakan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Keberadaan aturan yang memberikan keleluasaan bagi daerah tidak hanya dalam mengatur tata kelola rumah tangganya, namun juga keleluasaan dalam segenap potensi dan pengembangan daerahhnya. Di sisi lain juga aturan tersebut juga membuka peluang untuk memenuhi dan mengakomodir kebutuhan lokal daerah terkait dengan banyak hal. Salah satunya adalah identitas, simbol dan kekhasan yang menggambarkan karakter dan identitas daerah dan masyarakatnya. Serta keleuasaan menjalankan syari'ah agama dan tidak mengganggu ketertiban umum.¹⁶

Beberapa Perda di antaranya adalah, Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Di antara isi Perda tersebut sebagaimana tercantum dalam surat edaran Nomor 451.13/555-Kesra/2016 yang ditujukan kepada para pemilik Restoran, kafe, rumah makan, warung makanan dan minuman di

¹⁶ Keberadaan perundang-undangan ini juga membuka peluas lahirnya kebijakan, tuntutan daerah dalam ymemberikan keleluasaan tampilnya kekhasan,lokal wisdom dan sejenisnya.

Kota Serang. Demikian juga buka dan tutup tempat penjual makanan dan minuman selama bulan Rhamadlan termasuk yang di dalamnya terdapat tempat hiburan agar mematuhi jam buka dan tutup sebagaimana diatur dalam Perda.

Perda Kota Serang no 2 tahun 2010 pernah menjadi isu nasional karena kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Saeni sa;ah seorang pemilik warung nasi yang membuka dagangannya pada siang hari di bulan Rahamadhan, sehingga mendapat teguran dan juga tindakan dari Satpol PP Kota Serang sebagaimana diamankan Perda.

Peristiwa tanggal 8 Juni 2016 ini kemudian menjadi isu besar karena dipolitisasi dan menjadi frame yang berbeda-beda, bahkan media-media tertentu yang selama ini menyuarakan penolakan terhadap penerapan syariah bermain di balik pemberitaan ini yang cenderung tendensius dan mendistorsi pemerintah setempat. Peristiwa ini oleh beberapa kalangan sebagai salah satu bentuk agenda setting media tertentu untuk menolak Perda-Perda Syari'ah, yang kemudian mendapat respon dari pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri yang akan mengevaluasi Perda-Perda termasuk yang berbasis syari'ah ini. Para Ulama dan masyarakat Banten tetap berupaya mendukung Pemerintah Daerah untuk tetap mempertahankan Perda tersebut. Campur tangan pemerintah pusat termasuk

Presiden dalam kasus ini menandakan bahwa Perda Syari'ah tetap menjadi tarikan politik antara kepentingan masyarakat untuk menjalankan kehidupannya secara aman, tenang dan damai berhadapan dengan kepentingan dan politik kekuasaan yang anti syari'ah.

Perda lainnya adalah Perda yang terdapat di Kota Tangerang yaitu Perda No 7 Tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang. Perda ini lahir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai penyebab gangguan yang memicu hal-hal negatif baik secara fisik, materi, maupun sosial.

Menyikapi maraknya peredaran minuman keras di tengah masyarakat dan disinyalir menjadi penyebab rusaknya kesehatan fisik dan jiwa bahkan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kriminalitas. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Walikota Wahidin Halim yang didukung oleh kalangan Legislatif, ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum yang menyambut baik keberadaan Perda ini. Walaupun kalangan penggemar, produsen serta distributor dan pihak-pihak yang diuntungkan secara materil terus menggoyang dan berupaya menolak keberadaan Perda tersebut.

Demikian juga Perda No 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran yang juga ada di Kota Tangerang diwujudkan sebagai upaya melindungi masyarakat dari penyakit moral dan sosial. Sebagaimana Perda Syariah lainnya yang memiliki tujuan mulia dan tanggung jawab pemimpin tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat. Bagi masyarakat Muslim yang taat kehadiran perda-perda ini diapresiasi dan disyukuri, agar kehidupan masyarakat tenang, aman dan nyaman. Sebab kemaksiatan antara yang satu dengan yang lainnya cenderung berkolaborasi. Sarang pelacur umumnya juga menjadi bagian dari lingkaran peredaran minuman beralkohol, demikian juga sebaliknya orang yang minum-minuman keras dan mabuk-mabukan cenderung kehilangan kesadaran diri sehingga dapat melakukan apa saja di luar daya nalar dan kontrolnya.

Bahwa kebijakan-kebijakan di atas merupakan keputusan politik karena digagas oleh Pemerintah dan Parlemen. Kemunculan Perda sebagai salah satu bentuk kebijakan yang sekaligus juga sebagai media komunikasi Pemerintah dalam pengelola, mengatur dan melindungi masyarakat. Bahka hal itu akan berdampak secara politik sudah pasti, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian yang bersifat moral maupun materil. Akan tetapi sikap dan ketegasan Pemerintah dengan tetap

mempertahankan Perda-Perda di atas merupakan sebuah upaya pertahanan harga diri dan kehormatannya dan kewibawaannya sebagai pemimpin, manakala kebijakannya dimengerti, dipahami dan diamalkan oleh semua elemen masyarakat.

Publik ternyata juga berharap dan keberadaan Perda deikian dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman. Perda-Perda tersebut sudah tepat dan harus didukung karena justru akan melindungi masyarakat. Hanya saja harus diterapkan secara adil, misalnya larangan membuka penjualana makanan juga harus dilakukan di tempat-tempat penjualan restoran cepat saji yang menurut mereka justru belum mendapat tindakan, sementara mereka sudah buka sejak siang hari mendahului waktu yang dilarang dalam Perda.¹⁷

D. Bentuk dan Pemaknaan Simbol Agama di Ruang Publik dalam Bentuk Penamaan dan Tata Ruang

Ketika memasuki wilayah Banten baik di sekitar Kota Serang maupun Kota Tangerang bukannya menemukan tugu Selamat Datang, namun juga lampu-lampu hias yang bersisikan lafadz *Asma'ul Husna* (*Asma Allah al-Husna*) yang berjumlah

¹⁷ Wawancara dengan kalangan Mahasiswa perempuan yang biasa juga memiliki waktu tidak puasa ketika berhalangan, namun aturan harus ditegakan agar gtidak mengganggu yang puasa. Kalau kami berhalangan kami membawa bekal sendiri dan makan —ngupetl dari pandangan orang lain, walaupun yang puasa tidak tergoda tapi kan tidak etis. Demikian penuturan responden, di antaranya Lia, Silvy dan Anggi, (Wawancara, Serang 15 Agustus, 2016).

99. Asmaul Husna sendiri berarti nama-nama yang indah dan baik, yaitu nama-nama milik dzat Allah yang baik dan indah, agung yang hanya layak disandangkan kepada kepada Allah dan tidak ada yang setara dan bersekutu dengan-Nya (Allah yang Esa / Tauhid).

Keindahan Asma'ul Husna bukan hanya ada dalam pikiran umat Islam, kitab-kitab dan buku-buku bacaan, namun juga saat ini terpampang di jalan-jalan raya, jalan protokol sebagai bagian dari keindahan Tata Kota yang diselimuti dengan simbol agama. Sebagaimana ditemukan di jalan Protokol Kota Serang dari jalan Soedirman sampai jalan A. Yani. Demikian juga hal itu ditemukan di sepanjang jalan protokol di Kota Tangerang.

Lafazd-lafazd Asmaul Husna yang dipajang di ruang publik ini bukan tanpa tujuan, sebab secara fisik ia membutuhkan biaya yang tidak sedikit dari APBD. Namun secara semiotic simbolik hal itu dapat dimakanai dari beberapa sisi.

Pertama sebagai penunjuk identitas bahwa anda berada atau memasuki kawasan Islam yang bernaung dan menegakan perinsip-perinsip keadilan, kebaikan, kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan yang terpancar dari keindahan dan kebesaran nama-nama Allah yang indah dan baik. Kedua, hal itu

juga dapat dimaknai sebagai pengingat, bahwa dengan melihat dan mengingat asma Allah akan menjadi kendali diri.

Sebelumnya di pintu masuk Kota Serang berdiri tegak patung yang bagi kebanyakan kaum muslim Banten, melihat patung bukan dari aspek dan nilai seni tetapi berdasarkan keyakinan agama. Di mana patung dalam kerangka theologis sumber-sumber agama di makna secara theologis, patung dianggap sebagai penghalang masuknya keberkahan di mana Malaikat tidak akan masuk pada tempat atau rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung.¹⁸ Berbeda dengan beberapa wilayah yang mengutamakan aspek estetika dan seni dan melihat patung atau gambar-gambar semata-mata dari kaca mata artistic atau keindahan.

Simbol-simbol agama dalam bentuk lafazd-lafazd asmaul husna sebagai pengingat diri, dan membangkitkan kesadaran diri dengan melihat nama Tuhan diharapkan dapat mengingatkan diri selalu merasa diawasi. Sehingga malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kemunkaran, kejahatan atau dosa-doa lainnya. Kami mendukung walaupun dalam tataran implementasi

¹⁸ Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah beberapa Hadits yang menjeaskan bahwa Jibril pernah tidak mau masuk ke dalam rumah karena di dalamnya ada sebuah patung . Hadis-hadis senada juga banyak yang melarang peerjaan membuat patungan atau bermaksud menyaingi ciptaan Allah. Pemahaman ini oleh beberapa kalangan juga dimaknai bukan pada substansi patungnya akan tetapi pada sesuatu hal-hal yang menarik dan menjadi sesembahan selain Allah.

simbol-simbol tersebut belum memenuhi maksud dan tujuan dari tujuan awalnya, hal itu masih lebih baik di banding dalam bentuk tulisan atau gambar-gambar lain atau patung, agar identitas Islam ditampilkan. Dan yang lebih penting juga iwujudkan dalam perilaku sehari-hari masyarakat Banten yang katanya Islami.¹⁹

Namun demikian ironisnya tidak jarang juga ditemukan kemaksiatan, dan perbuatan tidak baik lainnya di balik atau di bawah tiang-tiang yang di dalamnya tertera lafazd Asmaul Husna. Artinya secara theologis keberadaan fisik simbol tersebut tidak memiliki signifikansinya dalam menekan angka kejahatan maupun kemaksiatan, oleh karenanya hal itu lebih pada penguatan identitas. Demikian juga makna politis tidak memiliki relevansi dengan pemasangan simbol-simbol tersebut.

Walaupun demikian keberadaan simbol-simbol Islam dalam berbagai bentuknya, penting ditampilkan diruang publik sebagai pagar dan pengingat, di samping juga sebagai identitas. Simbol-simbol yang dipaparkan di atas dalam pandangan publik sesungguhnya kurang memiliki signifikansi secara politis.

¹⁹ H.E. Musadad, tokoh muda Nahdhatul Ulama Wilayah Banten (Wawancara, 15, Agustus, 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab-bab di atas, penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin.

Bahwa penggunaan simbol-simbol agama di Banten cukup semarak, baik dalam bentuk Deskripsi Verbal, atau penggunaan istilah-istilah keagamaan yang digunakan dalam semboyan, motto, visi di wilayah Propinsi Banten, khususnya di Kota Serang dan Kota Tangerang. Seperti kata, istilah atau kalimat yang sarat dengan makna religiusitas, kata Iman dan Taqwa yang menjadi simbol Propinsi Banten. Demikian juga Serang Bertakwa dan Kota Serang Madani. Juga kata Akhlakul Karimah yang juga menjadi semboyan di Kota Tangerang. Simbol-simbol agama juga ada dalam bentuk Artifaktual atau penampilan fisik atau aksesoris yang mengandung simbol-simbol kesalehan, ketaatan, kealiman baik dari aspek pakaian, peci, gamis, maupun tempat-tempaang kerap dikunjungi oleh komunikator, khususnya pejabat atau politisi.

Simbol-simbol juga terwujud dalam bentuk peraturan daerah yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah (PERDA), Pergub, Perwal atau Perbup berbasis syari'ah

khususnya di Kota Serang dan Kota Tangerang, seperti Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Demikian juga Perda No.7, 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran, dan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Simbol-simbol demikian lahir pasca reformasi seiring dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dengan Desentralisasi daerah, di mana Pemerintah Daerah memiliki otonomi luas dalam mengatur, mengelola serta mengarahkan arah kebijakan dan pembangunan di daerahnya.

Simbol-simbol di atas dapat dimaknai sebagai bentuk atau identitas diri dan kedaerahan yang sangat religious, maupun juga bermakna syiar ataupun bermakna politis, khususnya yang dilakukan oleh politisi ataupun pemerintah, sebagai bagian dari komunikasi politik yang bertujuan untuk membangun citra, mendapatkan kepercayaan, dukungan maupun pengaruh.

Dari paparan di atas, penggunaan simbol-simbol keagamaan yang terpampang di ruang publik di Banten tidak memiliki signifikansi secara politik. Publik lebih memahaminya lebih kuat sebagai identitas. Kalaupun hal itu dilakukan komunikator dalam hal ini pemerintah, yang pastinya terkait dengan politis, baik politik dalam hal kebijakan maupun

komunikasi yang mengarah pada kepentingan dan keuntungan politik, berupa dukungan dan harapan publik luas terpenuhi. Contohnya keberadaan Perda-Perda berbasis Syari'ah di Banten merupakan sebuah kebutuhan. Karena keberadaan simbol bersentuhan langsung dengan hak hidup dan hajat hidup masyarakat. Sementara dalam simbol-simbol lain yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, lebih pada tataran dukungan dan simpatik (live service) dan bersifat jangka pendek.

B. Saran-saran

Penggunaan simbol-simbol keagamaan merupakan sebuah kewajaran, bagi umat beragama, karena agama sendiri juga tidak dapat melepaskan diri dari simbol. Akan tetapi simbol-simbol agama hendaknya menjadi acuan dan pengendali diri untuk menjadi lebih baik. Justru ketika simbol-simbol agama digunakan untuk kepentingan pragmatis, ekonomis maupun politis akan mendistorsi kemuliaan dan keunggulan dari agama itu sendiri, apabila dalam implementasinya justru jauh dari simbol-simbol agama yang ditampilkannya.

Oleh karenanya hendaknya penggunaan simbol agama hanya pada tataran yang wajar sebagai sebuah identitas yang juga diwujudkan dalam tataran implementasi dalam kehidupan sehari-hari baik di kalangan pemimpin dan juga masyarakatnya,

baik dalam hal kebijakan pembangunan maupun perilaku dan sistem pengelolaan pemerintahan itu sendiri yang agamis, lurus, benar, jauh dari korupsi dan kolusi. Jauh dari sikap-sikap malas, tidak produktif, tidak melayani, tidak menghormati dan melindungi, tidak amanah dan tidak adil. Sikap-sikap yang justru jauh dari simbol-simbol agama yang disanjungnya. Keberanian menggunakan simbol agama harus diiringi dengan keberanian untuk mengimplementasikannya, karena simbol agama bukanlah pajangan akan tetapi identitas dan karakter diri dalam bersikap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Naseri dan Ezhar Tamam, —Impact of Islamic Religious Symbol in Producing Favorable Attitude toward Advertisementl, *The Public Administration and Social Policies Review*, IV Year, No. 1, Juni 2012.
- Abdul Hamid, *Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru Studi Kiai dan Jawara di Banten*. ejournal undip.ac.id/ index.php/politik/article/download/
- Ayatullah Khumaeni, *Akulturası Islam dan Budaya Lokal dalam Magı Banten*, (Serang: Banteneologi, 2014)
- Barmawi Umary, *Materi Akhlak* (Solo: CV Rhamdhani, 1984)
- BPS Kota Cilegon, Cilegon dalam Angka 2014/2015
- BPS Kota Serang, Serang dalam Angka 2014
- BPS Propinsi Banten, Banten dalam Angka, Tahun 2011-2013.
- Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung: Remadja Karya, 1989)
- Deddy Mulayan, *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*, (Bandung: Rosdakarya, 2005)
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet ke 15, 2011)
- Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Rosdakarya, 2006)
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten, —Destinasi Pariwisata di Bantenl, 2015
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 2002)
- Khairunnisa, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi Simbol-Simbol Islam pada Ruang Publik di Kota Tangerang* (Ciputat: YPM, 2011)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991)

- M. Lutfullah Karaman, — Religion, Politics, And Mobilisation: A theoretical Perspective With A Special Note On The Indian Khilafat Movement, *Alternatives Turkish Journal of International Relations*, Vol.3, No. 1 Spring 2004), [http://www.Jstor.org/alternativejournal.net/Vol.3/number 1/karaman.pdf](http://www.Jstor.org/alternativejournal.net/Vol.3/number%201/karaman.pdf).(diakses ;8 – 12-2012)
- M.A Djazimi dkk, *Etnis Betawi di Banten*, (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN SMH Banten, 2015)
- M.A. Tihami, *Kiyai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang Banten*, —Tesis, Universitas Indonesia, 1992
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995)
- Muhammad Hudaeri, dkk, *Hubungan Antar Umat Beragama di Banten: Konflik dan Integrasi*, (Serang: Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2011)
- Nina Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan Ulama dan Jawara* (Jakarta: LP3ES, 2004)
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000)
- Noorhaidi Hasan, dkk., *Islam di ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2011)
- Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988)
- Onong Uchyana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Komunikatif* (Yogyakarta: LKIS, 2008)
- W. Little Jhon-Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, edisi-9, terj. Muhammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Humanika, 2009)